

# **SKRIPSI**

**PERILAKU POLITIK KEAGAMAAN WARGA MUHAMMADIYAH  
DAN TARBIYAH ISLAMIAH DESA BATU BELAH  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR 2011**



Oleh:

**YENI YAS TUTI**  
**NIM : 1082003881**

**PROGRAM S1  
JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
PEKANBARU - RIAU  
1433H/ 2012M**

## ABSTRAK

YENNI YAS TUTI, (2012): “Perilaku Politik Keagamaan Warga Muhammadiyah dan Tarbiyah Islamiyah Desa Batu Belah dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kampar 2011”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui paradigma warga Muhammadiyah dan Tarbiyah Islamiyah Desa Batu Belah dalam memilih pemimpin, dan mengetahui perilaku politik keagamaan warga Muhammadiyah dan Tarbiyah Islamiyah Desa Batu Belah dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kampar 2011.

Analisis data empiris dalam penelitian ini yaitu data yang telah diperoleh di lapangan dikelompokkan dan dikategorikan oleh peneliti untuk selanjutnya dibandingkan dan dicari pola-pola hubungannya dengan teori atau konsep yang peneliti gunakan, kemudian dilakukan interpretasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa paradigma warga Muhammadiyah Desa Batu Belah dalam memilih pemimpin berpandangan bahwa sebagai organisasi non-politik, tidak begitu terlibat dalam politik praktis dengan mendukung salah satu pasangan calon Kepala Daerah dalam Pilkada Kabupaten Kampar tahun 2011. Hal ini dapat dilihat dari dua sikap; *Pertama*, Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang bergerak dalam hal amaliyah dan mu’amalah sehingga tidak mempunyai hubungan organisatoris dan bukan merupakan afiliasi dari suatu partai politik; *Kedua*, setiap warga Muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya bebas untuk menyalurkan aspirasi melalui organisasi lain atau partai politik di mana secara individu dapat memainkan peran politiknya sesuai dengan aspirasi politiknya, dan secara kelembagaan, Muhammadiyah memberi kebebasan kepada warganya. Sedangkan paradigma Tarbiyah Islamiyah menjadikan warga Tarbiyah Islamiyah sebagai salah satu basis kekuatan suara. Hal ini dilandasi oleh dua pemikiran: *Pertama*, karena mereka ingin menjadikan pemimpin daerah berasal dari organisasi Tarbiyah Islamiyah yang diharapkan mampu membawa perubahan dan kemajuan organisasi. *Kedua*, dengan memilih tokoh Tarbiyah Islamiyah diharapkan mampu mengembangkan potensi dan naluri politik yang mereka miliki, sehingga memperoleh akses kepada kekuasaan, dan mampu mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah.

Perilaku politik keagamaan warga Muhammadiyah dan Tarbiyah Islamiyah Desa Batu Belah dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kampar 2011 terdapat perbedaan yang cukup signifikan, warga Muhammadiyah tidak mau terlibat langsung dalam proses dan memberikan dukungan kepada pasangan calon, sedangkan warga Tarbiyah Islamiyah, terlibat langsung dalam proses politik yang sedang berlangsung dengan menghimbau warganya untuk memilih salah satu pasangan calon dan bahkan ada diantara tokohnya terjun langsung menjadi salah satu tim sukses pemenang salah satu calon.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>PENGHARGAAN</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	8
C. Perumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	17
 <b>BAB II GAMBARAN UMUM DESA BATU BELAH DAN KEBERADAAN MUHAMMADIYAH DAN TARBIYAH ISLAMIYAH DI DESA BATU BELAH</b>	
A. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Kampar.....	19
B. Keberadaan Muhammadiyah dan Tarbiyah Islamiyah Desa Batu Belah.....	25
 <b>BAB III LANDASAN TEORI TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN PERILAKU POLITIK KEAGAMAAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH</b>	
A. Landasan Teori Tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.....	27
B. Teori Perilaku Politik.....	34
C. Perilaku Tokoh Masyarakat dan Politik Keagamaan .....	47

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Paradigma Warga Muhammadiyah dan Tarbiyah Islamiyah Desa Batu Belah Dalam Memilih Pemimpin.....	55
B. Perilaku Politik Keagamaan Warga Muhammadiyah dan Tarbiyah Islamiyah Desa Batu Belah dalam Pemilihan Kepala Daerah.....	66

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dari sudut demokrasi, otonomi daerah dalam artian formal diperlukan untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Dari segi materil, otonomi daerah mengandung makna sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan yang bersanding dengan prinsip sistem pembagian kekuasaan menurut dasar negara berdasarkan atas hukum. Oleh karena otonomi daerah berkaitan dengan demokrasi, maka penyelenggaraan pemerintahan harus dijalankan secara demokratis yang meliputi tata cara pemilihan kepala daerah, penentuan kebijakan, pertanggungjawaban, pengawasan dan lain-lainnya, mekanisme pemerintahan harus dilakukan dengan tata cara yang demokratis pula.<sup>1</sup>

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah propinsi dan kabupaten atau kota. Rakyat memiliki hak untuk menentukan dan memilih secara langsung kepala dan wakil kepala daerahnya masing-masing, artinya pada wilayah kabupaten, masyarakat dapat memilih calon Bupati dan Wakil Bupati, pada wilayah kota, masyarakat dapat memilih calon Walikota dan Wakil Walikota, dan dalam wilayah Propinsi, masyarakat dapat memilih Gubernur dan Wakil Gubernur. Pemilihan secara langsung

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perjuangan dan Problematika*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, tt), hlm. 190.

tersebut tidak lepas dari kebijakan otonomi daerah yang diberikan oleh pusat kepada daerah.

Pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan suatu kemajuan dan pembaruan. Pemilihan kepala daerah secara langsung akan menjadi babak penting dalam perpolitikan di Indonesia, dimana rakyat dapat secara langsung terlibat dalam pemilihan pemimpinnya.

Pilihan politik untuk menyelenggarakan pilkada merupakan keputusan politik strategis dan layak dicatat sebagai peristiwa politik yang melampaui nilai-nilai atau bahkan doktrin-doktrin yang tertanam lebih dari setengah abad digunakannya sistem pemilihan tidak langsung, baik pengangkatan dan atau penunjukan pusat atau pemilihan perwakilan.<sup>2</sup>

Secara esensial pilkada harus dipandang sebagai proses untuk memunculkan pemimpin lokal melalui proses partisipasi masyarakat secara langsung untuk menentukan pemimpin bagi wilayahnya. Adanya partisipasi ini merupakan salah satu wujud dari proses pemberdayaan, bahwa proses pemunculan pemimpin harus melalui seleksi dimana dukungan masyarakat berperan sebagai faktor krusial. Adanya dukungan ini tidak terlepas dari kredibilitas dan kemampuan pemimpin untuk menyerap apa yang menjadi kehendak dan keinginan masyarakat dan mengartikulasikannya dalam program yang ditawarkan, sehingga pemimpin daerah yang muncul melalui proses ini diharapkan akan mampu menjalankan aspirasi dan harapan masyarakat pemilihnya.

---

<sup>2</sup> Joko J.Prihatmoko,*Pemilihan Kepala Daerah Langsung*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 31.

Apabila ditinjau lebih lanjut, kemenangan saat pemilihan sebenarnya merupakan tahapan awal bagi kepala daerah terpilih untuk membuktikan kapabilitasnya dalam memimpin wilayahnya. Adapun langkah berikutnya adalah bagaimana proses kepemimpinan kepala daerah, terutama dikaitkan dengan kemampuannya untuk mempengaruhi masyarakat untuk melakukan perubahan. Dalam konteks ini, perubahan tersebut ditandai dengan peningkatan kesejahteraan, yang diimplementasikan melalui proses pembangunan ekonomi bagi daerah yang dipimpinnya, sekaligus hal ini merupakan tolak ukur utama keberhasilan pemimpin lokal.<sup>3</sup>

Partisipasi politik masyarakat berkaitan erat dengan demokrasi suatu negara. Dalam negara demokratis, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang melaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan, serta masa depan dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Anggota masyarakat secara langsung memilih wakil-wakil yang akan duduk di lembaga pemerintahan. Dengan kata lain, partisipasi langsung dari masyarakat yang seperti ini merupakan pengejawantahan dan penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah dan oleh rakyat, keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi sangatlah penting karena teori demokrasi menyebutkan bahwa masyarakat tersebut sangatlah mengetahui apa yang mereka kehendaki. Hak-hak sipil dan kebebasan dihormati serta dijunjung tinggi. Tiada demokrasi tanpa partisipasi politik warga, sebab partisipasi merupakan esensi dari demokrasi. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam berpolitik merupakan ukuran demokrasi suatu negara.

---

<sup>3</sup> Adi Suprpto, *Pilkada Langsung dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Fisip UVN Veteran), 2005. hlm. 103.

Pengertian demokrasi secara normatif, adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.<sup>4</sup> Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya sendiri adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dalam hal ini masyarakat ikut berpartisipasi. Baik ketika dia memilih calon pemimpin atau ikut di dalam kampanye maupun partai politik.

Partisipasi politik, menurut Herbet Mc Closky yang dikutip oleh Damsar di dalam “Pengantar Sosiologi Politik” dapat diartikan sebagai kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui pemilihan pemimpin baik secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.<sup>5</sup>

Menurut Max Weber sebagaimana dikutip Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa masyarakat melakukan aktivitas politik karena: *Pertama*, alasan rasional nilai, yaitu alasan yang didasarkan atas penerimaan secara rasional akan nilai-nilai suatu kelompok. *Kedua*, alasan emosional afektif, yaitu alasan didasarkan atas kebencian atau sukarela terhadap suatu ide, organisasi, partai atau individu. *Ketiga*, alasan tradisional, yaitu alasan yang didasarkan atas penerimaan norma tingkah laku individu atau tradisi tertentu dari suatu kelompok sosial. *Keempat*, alasan rasional

---

<sup>4</sup> Mochtar Mas'oed, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 43.

<sup>5</sup> Herbert Mc.Closky, *International Encyclopaedia of the Social Sciences*, dalam Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.180.



instrumental, yaitu alasan yang didasarkan atas kalkulasi untung rugi secara ekonomi.<sup>6</sup>

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan cara memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Ramlan Surbakti mendefinisikan partisipasi politik itu sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan ikut menentukan pemimpin pemerintahan.

Perilaku politik masyarakat itu sendiri dapat dilihat ketika masyarakat tersebut ikut berpartisipasi, misalnya dalam pemilu. Rakyat membuat kontrak sosial dengan para pemimpin melalui pemilu. Pada saat pemilu rakyat dapat memilih figur yang dapat dipercaya untuk mengisi jabatan legislatif dan eksekutif. Di dalam pemilu, rakyat yang telah memenuhi syarat untuk memilih, secara bebas, dan rahasia, menjatuhkan pilihannya pada figur yang dinilai sesuai dengan aspirasinya.<sup>7</sup>

Dalam pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah langsung di Kabupaten Kampar yang baru dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kampar pada tanggal 10 September 2011 yang lalu, pasangan Jefry Noer – Ibrahim Ali yang didukung oleh koalisi tiga partai, yakni Partai Demokrat, PKS, dan PAN berhasil mengungguli kedua pasangan calon lainnya. Hasil perolehan suara semua

---

<sup>6</sup> Miriam Budhiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: PT.Gramedia, 1998), hlm 12.

<sup>7</sup> Sudijono, Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, (Semarang: IKIP Press, 2005), hlm.5-6.

pasangan calon sebagai berikut; 1) Pasangan calon Nasrun Efendi – Tengku Nizar yang didukung oleh Partai PDK, PDP, PDS, PPRN dan partai non parlemen lainnya memperoleh suara 56.416 (21.71%) suara; 2) Pasangan Burhanuddin Husin - Zulher MS, yang didukung oleh Partai Golkar PPP, Gerindra, Hanura, PBR, dan PPNUI mendapatkan suara 95.972 (36.93%); dan 3) Pasangan calon H. Jefry Noer - Ibrahim Ali memperoleh suara terbanyak yaitu 107. 521 (41.37%) suara. Untuk lebih jelasnya perolehan suara semua calon dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel.I.1**  
**Hasil Perolehan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2011**

NO	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI PENDUKUNG	PERSENTASE SUARA PARTAI	PERSENTASE SUARA CALON
1.	NASRUN EFENDI Dan TENGGU NIZAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ PDK,</li> <li>➤ PDP,</li> <li>➤ PDS,</li> <li>➤ PPRN</li> </ul>	17,77%	21,71%
2.	BURHANUDDIN HUSIN Dan ZULHER, MS	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Golkar</li> <li>➤ PPP,</li> <li>➤ Gerindra,</li> <li>➤ Hanura, PBR,</li> <li>➤ PPNUI</li> </ul>	33,33%	36,93%
3.	JEFRY NOER Dan IBRAHIM ALI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Demokrat</li> <li>➤ PKS</li> <li>➤ PAN</li> </ul>	48,89%	41,37%

Sumber: *Kantor KPU Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2012.*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pasangan Jefry Noer- Ibrahim Ali mendapatkan suara terbanyak dan terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati di Kampar untuk periode 2011 - 2016 dalam proses demokrasi politik pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Kampar. Jefry Noer adalah mantan Bupati Kampar pada periode 2001-2006 yang dikalahkan oleh Burhanuddin Husin pada Pemilukada Kabupaten Kampar tahun 2006.

Hal inilah yang sangat menarik bagi peneliti sehingga peneliti mencoba melihat bagaimana Pasangan Jefry Noer-Ibrahim Ali dan timnya dapat memanfaatkan semua potensi dan sumber daya politik yang mereka miliki dalam merebut kembali kursi “Kampar 1” setelah 1 periode kepemimpinan diraih oleh Burhanuddin Husin. Robert Dahl sebagaimana di ditulis Mochtar Mas’ud dan Nasikun,<sup>8</sup> menyebutkan bahwa sumber daya politik dapat dilihat dari beberapa hal yaitu :

1) Perbedaan dalam distribusi sumber daya politik

Sumber daya politik adalah sarana-sarana yang bisa dipakai aktor politik untuk mempengaruhi orang-orang atau kelompok lain. Sumber daya politik itu bisa berwujud kekuatan fisik atau daya paksa, harta kekayaan, kepandaian, dan status sosial dalam masyarakat

2) Perbedaan dalam kecakapan dan efisiensi seseorang dalam memanfaatkan sumber daya politik.

Perbedaan dalam kecakapan politik ini terjadi karena perbedaan dalam bakat, kesempatan dan motivasi untuk mempelajari dan mempraktekkan kecakapan politik.

3) Perbedaan dalam banyaknya sumber daya politik yang dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya.

Perbedaan penggunaan sumber daya politik berwujud kekayaan itu diakibatkan oleh adanya perbedaan motivasi yang pada gilirannya disebabkan oleh perbedaan bakat dan pengalaman.

---

<sup>8</sup> Mochtar Mas’oed, Nasikun, *Sosiologi Politik*, (Yogyakarta : PAU Studi Sosial UGM, 1987), hlm.37.

Pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang secara langsung tersebut mengharuskan para kandidat atau calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menyiasati dengan strategi-strategi yang tepat agar dapat mempengaruhi perilaku politik masyarakat khususnya warga Muhammadiyah dan Tarbiyah Islamiyah Desa Batu Belah sehingga mendapatkan simpati/ dukungan dari masyarakat dan keluar sebagai pemenang dalam pemilihan.

Perilaku politik warga Muhammadiyah dan Tarbiyah Islamiyah dalam memilih Kepala Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 cenderung tidak sama karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketokohan pemimpin masing-masing organisasi dan perbedaan strategi pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pasangan calon dalam mendapatkan suara dari kedua organisasi keagamaan yang ada di Desa Batu Belah.

Dalam penelitian ini peneliti akan mencoba melihat bagaimana pasangan calon yang menang yakni pasangan Jefry Noer –Ibrahim Ali mampu memanfaatkan strategi pemenangan sehingga dapat mempengaruhi perilaku politik warga Muhammadiyah dan Tarbiyah Islamiyah Desa Batu Belah untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya melalui sebuah penelitian yang berjudul: “PERILAKU POLITIK KEAGAMAAN WARGA MUHAMMADIYAH DAN TARBIYAH ISLAMIYAH DESA BATU BELAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KAMPAR 2011”.

## **B. Pembatasan Masalah**

Untuk lebih terarahnya penelitian ini peneliti merasa perlu melakukan pembatasan masalah penelitian ini dalam hal perilaku politik keagamaan warga

Muhammadiyah dan Tarbiyah Islamiyah Desa Batu Belah dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kampar 2011.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik suatu permasalahan penelitian yaitu:

1. Bagaimanakah paradigma warga Muhammadiyah dan Tarbiyah Islamiyah Desa Batu Belah dalam memilih pemimpin?.
2. Bagaimanakah perilaku politik keagamaan warga Muhammadiyah dan Tarbiyah Islamiyah Desa Batu Belah dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kampar 2011 menurut perspektif siyasah?.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui paradigma warga Muhammadiyah dan Tarbiyah Islamiyah Desa Batu Belah dalam memilih pemimpin.
- b. Untuk mengetahui perilaku politik keagamaan warga Muhammadiyah dan Tarbiyah Islamiyah Desa Batu Belah dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kampar 2011 menurut perspektif siyasah.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Dari sisi akademis berguna untuk menambah khazanah pustaka yang memfokuskan penelitian di bidang Pemilihan Langsung Kepala Daerah dengan dinamika dan kompleksitas yang muncul di dalamnya.
- b. Dari sisi praktis dapat dijadikan bahan kajian bagi pihak terkait untuk yang ingin terjun ke arena politis dalam pemilihan Kepala Daerah.
- c. Dari sisi sosial dapat dijadikan informasi bagi masyarakat tentang dinamika yang muncul dalam sebuah peraturan politik terutama dalam Pemilihan Kepala Daerah.
- d. Dari sisi teknis dapat menjadi acuan tentang tata cara pelaksanaan dan penetapan strategi dalam memenangkan pilkada termasuk mengakumulasi sumber daya politik.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Desain Penelitian**

Salah satu bagian penting dalam penelitian adalah menyusun rencana mengenai penelitian yang dilakukan.<sup>9</sup> Desain dan rancangan penelitian memperlihatkan bagaimana langkah-langkah peneliti dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Burhan Mungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.37.

<sup>10</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya), hlm. 91.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian studi kasus, yaitu suatu bentuk penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan sosial dan dapat juga terperinci tentang seseorang atau suatu unit sosial selama kurun waktu tertentu. Menurut Creswell, desain penelitian dalam pendekatan kualitatif, khususnya di bidang ilmu politik adalah desain studi kasus.<sup>11</sup> Namun Creswell tidak menjelaskan lebih jauh mengenai bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penelitian studi kasus. Untuk lebih memahami desain studi kasus peneliti menggunakan Robert K. Yin yang menyebutkan ada dua ciri desain studi kasus ini, yaitu dengan menggunakan pertanyaan “*how*” atau “*why*”; fokus pada fenomena kontemporer pada konteks ilmiah, dimana fenomena tersebut tidak dapat dikontrol, dan multi sumber bukti serta dapat dimanfaatkan.<sup>12</sup>

Sedangkan tipe penelitian bersifat deskriptif yang berarti mendeskripsikan pemanfaatan sumber daya politik dalam upaya memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Untuk itulah peneliti memilih jenis penelitian ini karena relatif cocok dengan permasalahan yang diteliti.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

## **3. Subjek dan Objek Penelitian**

Pemilihan Kepala Daerah ini merupakan suatu fakta yang sangat menarik untuk diteliti, hal ini juga dilatar belakangi oleh adanya 2 organisasi

---

<sup>11</sup> John W. Creswell, *Research Design, Qualitative and Quantitative Approaches*, (Jakarta : KIK Press, tt), hlm. 141.

<sup>12</sup> Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2005), hlm. 1.

Islam yang berbeda di Desa Batu Belah yaitu Muhammadiyah dan Tarbiyah Islamiyah yang sama-sama cukup berpengaruh terhadap sikap politik masyarakat dalam menentukan pilihan. Kemudian penelitian ini akan fokus ada pembahasan politik keagamaan mengingat Kabupaten Kampar merupakan daerah yang agamis dengan julukan “serambi Mekkah”nya Provinsi Riau.

Subjek dan objek penelitian ini adalah pengurus dan warga Muhammadiyah dan Tarbiyah Islamiyah Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

#### **4. Peranan Peneliti**

Dalam penelitian ini peneliti memegang peranan sebagai interpretator terhadap data yang ditemui di lapangan (subyek penelitian). Dalam konteks penelitian ini, peneliti memegang peranan sebagai berikut :

- a. Data yang dijumpai terkadang bersifat normatif, oleh karena itu penulis harus memandang permasalahan secara obyektif dan profesional.
- b. Posisi peneliti sekaligus menetapkan instrumen penelitian dengan kerangka-kerangka acuan teoritis namun tetap berpijak pada dinamika yang muncul di dalam perkembangan politik.
- c. Dalam penelitian ini, posisi peneliti berada di luar organisasi tim sukses sehingga peneliti bisa mengolah informasi-informasi hasil wawancara untuk mendeskripsikan pemanfaatan perilaku politik keagamaan kedua organisasi (Muhammadiyah dan Tarbiyah Islamiyah) dalam upaya memenangkan Pilkada Langsung secara obyektif.



## 5. Unit Analisis

Dalam suatu penelitian, unit analisis berguna untuk memfokuskan kajian yang dilakukan atau dengan pengertian lain obyek yang diteliti ditentukan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini yang dijadikan unit analisis adalah kelompok, karena mereka terlibat langsung dalam pemanfaatan perilaku politik keagamaan dalam upaya memenangkan Pilkada Langsung.

## 6. Teknik Pemilihan Informan

Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang dapat memberikan keterangan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian, dimana informan ini merupakan suatu istilah yang dapat menggambarkan subyek yang bertugas memberikan data dalam bentuk informasi.

Dalam penelitian kualitatif yang terpenting dalam prosedur *sampling* adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*) yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian.<sup>13</sup> Pemilihan Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penarikan informan secara sengaja, dimana peneliti memilih informan dengan anggapan dan pendapat sendiri,<sup>14</sup> dan dengan mengidentifikasi beberapa subjek penelitian yang memiliki katakteristik yang relevan dengan kajian atau permasalahan yang ada.

---

<sup>13</sup> Burhan Bungin, "Analisis Data Penelitian Kualitatif", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm : 53.

<sup>14</sup> Manasse Malo, "Metode Penelitian Sosial Modul 1-5". (Jakarta: Kuranika, 1985), hlm. 168.

Menurut Spradley dalam buku penelitian kualitatif karya Sanapiah Faisal ada beberapa kriteria atau alasan dalam memilih informan, yaitu :

- a. Informan telah cukup lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran perhatian penelitian.
- b. Informan masih terlibat dalam kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.
- c. Informan mempunyai cukup waktu untuk diwawancarai.<sup>15</sup>

Terlepas dari itu semua, subjek dalam penelitian kualitatif (baik yang dipilih sebagai informan awal atau informan berikutnya), harus benar-benar memiliki predikat sebagai *key informan* yang sarat informasi yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian..

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pengurus dari kedua organisasi. Wawancara ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi lebih tajam dan akurat. Dengan demikian data yang didapatkan lebih akurat dan sesuai dengan fakta di lapangan.

## **7. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data Primer (wawancara) yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian (responden), sedangkan data sekunder (dokumentasi) adalah data yang diperoleh langsung dari lembaga atau institusi tertentu, seperti Biro Pusat Statistik, KPUD, dan lain-lain.<sup>16</sup> Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini sebagai berikut ;

---

<sup>15</sup> Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Malang : Tp, 1990), hlm. 61.

<sup>16</sup> Bagong Suyatno dan Sutinah (ed), *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2005), hlm. 55.

- a. Wawancara yaitu komunikasi verbal dengan informan berkaitan dengan substansi penelitian. Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang dipergunakan adalah wawancara yang mendalam (*indepth interview*), dimana informannya telah mengetahui maksud dan tujuan peneliti secara garis besar dan sifatnya tidak mengikat. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan secara bercakap-cakap dan bertatapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terstruktur agar peneliti bisa secara leluasa melacak ke berbagai segi dan arah guna mendapatkan informasi selengkap mungkin.
- b. Dokumentasi, yaitu melakukan studi dokumentasi terhadap laporan yang telah dipublikasikan ataupun dari buku-buku pustaka yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Dokumentasi juga merupakan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi dari latar belakang penelitian.<sup>18</sup>

## 8. Uji Pembuktian (Triangulasi) Data

Dalam penelitian ini untuk melakukan uji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi data berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

---

<sup>17</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2006, hlm.67.

<sup>18</sup> *Ibid.*

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data dan sumber data. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, yakni dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi sumber data berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Triangulasi sumber data yang peneliti lakukan disini adalah dengan melakukan perbandingan diantara informan penelitian, serta dengan sumber data sekunder seperti dokumen-dokumen resmi lainnya. Disamping itu juga dilakukan triangulasi dengan Teman sejawat, karena peneliti sering berdiskusi dengan teman-teman dan orang-orang yang peneliti nilai banyak mengetahui mengenai permasalahan ini.

## 9. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan sehingga memiliki makna<sup>19</sup>. Selain itu, analisis data merupakan suatu proses pengorganisasian data yang terdiri atas catatan lapangan, hasil rekaman, dokumen berupa laporan dengan cara mengumpulkan, mengurutkan, mengelompokkan, dan mengkategorikan data sehingga mudah untuk diinterpretasikan dan dipahami.<sup>20</sup>

Dalam studi kasus terdapat tiga strategi analisis data, yaitu penjadohan pola, pembuatan eksplanasi dan analisis deret waktu.<sup>21</sup> Strategi analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi penjadohan pola. Strategi penjadohan pola bertujuan untuk menganalisa data studi kasus dengan

---

<sup>19</sup> Masri Singarimbun, Ed, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1999), hlm. 263.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> K. Yin, *Op-Cit.*, hlm, 140.

membandingkan suatu pola yang didasarkan atas empiris dengan pola yang diprediksikan, yang telah terangkum dalam kerangka konsep penelitian.

Data empiris dalam penelitian ini yaitu data yang telah diperoleh di lapangan dengan teknik pengumpulan data yang telah ditetapkan. Data tersebut kemudian dikelompokkan dan dikategorikan oleh peneliti untuk selanjutnya dibandingkan dan dicari pola-pola hubungannya dengan teori atau konsep yang peneliti gunakan.

Seluruh data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan literature yang ada disusun secara sistematis dan disajikan dengan mendeskripsikan dan di olah secara analitatif. Analisis data dilakukan secara interpretasi, artinya memberikan makna kepada analisis, menghasilkan pola atau kategori, mencatat hubungan antar konsep.<sup>22</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan ini penulis membagi dalam 5 (lima) bab pokok pembahasan, sebagai gambaran dari masing-masing bab diperlukan suatu kerangka sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>22</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik*, (Bandung: Tarsito, 1996), hlm. 126.

**BAB II : GAMBARAN UMUM DESA BATU BELAH DAN PROFIL MUHAMMADIYAH DAN TARBIYAH ISLAMIYAH DI DESA BATU BELAH**

Pada bab ini diskripsikan tentang gambaran umum Desa Batu Belah dan profil Muhammadiyah dan Tarbiyah Islamiyah di Desa Batu Belah.

**BAB III : LANDASAN TEORI TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN PERILAKU POLITIK KEAGAMAAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

Bab ini berisikan tentang teori Tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, Teori Perilaku Politik, dan Perilaku Tokoh Masyarakat dan Politik Kegamaan

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini merupakan hasil penelitian, dan pembahasan antara teori dan implementasi.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah.

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM DESA BATU BELAH**  
**DAN KEBERADAAN MUHAMMADIYAH DAN TARBIYAH**  
**ISLAMİYAH DI DESA BATU BELAH**

**A. Gambaran Umum Desa Batu Belah Kecamatan Kampar**

**1. Sejarah Desa Batu Belah Kecamatan Kampar**

Desa Batu Belah merupakan salah satu desa yang termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Sebelum dijelaskan secara khusus tentang gambaran umum Desa Batu Belah, penulis terlebih dahulu memberikan gambaran tentang Kabupaten Kampar secara umum yang berkaitan erat dengan sejarah keberadaan Desa Batu Belah Kecamatan Kampar. Berdasarkan data Kampar Dalam Angka Tahun 2010 disebutkan bahwa dengan berlandaskan pada Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor: 10/GM/STE/49 tanggal 9 Nopember 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Propinsi Riau terdiri dari Kawedanaan Palalawan, Pasir Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibu kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1956 ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967.<sup>1</sup>

Semenjak terbentuk Kabupaten Kampar pada tahun 1949 sampai tahun 2006 sudah 21 kali masa jabatan Bupati Kepala Daerah. Sampai Jabatan Bupati

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar, *Kampar Dalam Angka (Kampar in Figures)*, (Bangkinang, Kampar-Kampar Riau : BPS Kabupaten Kampar, 2010), hlm. 1.

yang keenam (H. Soebrantas S.) ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang berdasarkan UU No. 12 tahun 1956.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan ibu kota Kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain :

- a) Pekanbaru sudah menjadi ibu kota Propinsi Riau.
- b) Pekanbaru selain menjadi ibu kota propinsi juga sudah menjadi Kotamadya.
- c) Mengingat luasnya daerah Kabupaten Kampar sudah sewajarnya ibu kota dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- d) Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari Pekanbaru.
- e) Bangkinang terletak di tengah-tengah daerah Kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan ke seluruh wilayah kecamatan dan sebaliknya.

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 dan Peraturan Daerah Tingkat I Riau Nomor 06 tahun 1995, Kabupaten Kampar ditetapkan sebagai salah satu proyek percontohan otonomi. Guna kelancaran roda pemerintahan berdsarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 tahun 1994 di Kabupaten dibetuk 23 Dinas Daerah, sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 61



tahun 1958 hanya terdapat 5 Dinas (Dinas Pertanian, Pendidikan dan Kebudayaan, Perindustrian, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum).<sup>2</sup>

Dengan bergulirnya era reformasi dengan semangat demokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah di tingkat Kabupaten/ Kota yang baru di Propinsi Riau yang berasal dari pemekaran beberapa kabupaten, termasuk di Kabupaten Kampar yang dimekarkan menjadi 3 (tiga) wilayah Pemerintahan yaitu :

- a) Kabupaten Kampar, terdiri dari 8 Kecamatan meliputi 153 Desa dan 8 Kelurahan dengan Ibu Kota Bangkinang.
- b) Kabupaten Pelalawan terdiri dari 4 Kecamatan, meliputi 81 Desa dan 4 Kelurahan, dengan Ibu Kota Pangkalan Kerinci.
- c) Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 7 Kecamatan, meliputi 89 Desa dan 6 Kelurahan dengan Ibu Kota Pasisir Pengaraian.<sup>3</sup>

## **2. Kondisi Geografis**

Desa Batu Belah memiliki luas wilayah kurang lebih 3.378 Ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Kampar.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rimbo Simpang Kubu.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kumantan.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Rambutan.

Pada umumnya tanah di daerah ini merupakan dataran rendah, jenis tanah yang terdapat pada daerah ini adalah tanah merah dengan pH 5 – 6, dimana derajat kesamaan (pH) ini mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap hewan-hewan

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 4.

air. Sehingga sering digunakan sebagai petunjuk untuk menyatakan baik buruknya keadaan.

Ditinjau dari segi iklim, wilayah Desa Batu Belah hampir sama dengan desa lain yang ada di Kecamatan Kampar. Pada umumnya ada dua musim yang bergantian yaitu :

1. Musim kemarau, biasanya sekitar bulan April sampai dengan bulan September.
2. Musim hujan, biasanya sekitar bulan Oktober sampai dengan bulan April.

Namun demikian peredaran musim tersebut tidaklah merupakan sarat mutlak terjadinya pada bulan itu, tetapi pergeseran untuk beberapa bulan seperti yang terjadi pada daerah lainnya di Kabupaten Kampar. Sedangkan curah hujan berkisar antara 3.000 – 3.500 mm pertahun.

### **3. Kondisi Demografis**

Penduduk merupakan faktor penggerak pembangunan desa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber alam dan menggerakkan tujuan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dan tingkat perkembangan yang tinggi merupakan tantangan maupun harapan bagi kita. Harapan itu adalah apabila jumlah penduduk yang sangat besar bila dibina dan di arahkan sebagai tenaga kerja yang efektif, maka hal demikian merupakan modal pembangunan yang sangat besar dan sangat menguntungkan bagi usaha-usaha pembangunan di segala bidang. Namun merupakan tantangan atau faktor penghambat adalah jika penduduk tidak mempunyai pekerjaan atau golongan penduduk bekerja tetapi produktivitasnya rendah.

Desa Batu Belah memiliki jumlah penduduk 10.880 dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 5.516 jiwa atau 50,7%, dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 5.364 jiwa atau 49,3%. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat komposisi penduduk menurut kelompok Desa di Batu Belah .

**Tabel II.1**  
**Komposisi Penduduk dan Mata Pencaharaan**  
**Penduduk Desa Batu Belah Tahun 2012**

<b>Klp. Umur</b>	<b>Jumlah (Jiwa)</b>	<b>(%)</b>	<b>Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>	<b>(%)</b>
0 – 14	1.913	17,58	Petani/Nelayan	3.845	46,59
15 – 25	3.108	28,57	Buruh	1.363	16,52
26 – 40	4.635	42,60	PNS	1.127	13,66
40 – keatas	1.224	11,25	Pedagang	1.286	15,57
			Tukang	632	7,66
Jumlah	10.880	100,00		8.253	100,00

Sumber : Data Kantor Batu Belah Kecamatan Kampar, Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tenaga kerja jika ditinjau dari struktur umur, maka usia kerja yang produktif adalah penduduk yang berusia 15 – 40 tahun yang berjumlah 7.743 jiwa atau 71,17%, hal ini menunjukkan bahwa Desa Batu Belah mempunyai proporsi usia produktif yang relatif tinggi.

Pola usaha dan kegiatan ekonomi penduduk tidak sama pada setiap daerah. Di daerah pedesaan umumnya tertuju pada sektor pertanian dan sektor perikanan. Sesuai dengan kondisi geografis Desa Batu Belah, maka sebagian besar penduduknya tergantung pada hasil pertanian dan perikanan, karena mata pencaharian mereka sebagian besar adalah bertani.

Selain itu terlihat pula sebagian besar penduduk mempunyai mata pencaharian di sektor pertanian yang termasuk didalamnya sektor perternakan dan perikanan yaitu sebanyak 3.845 orang atau 46,59%. Kemudian penduduk sebagai buruh berjumlah 1.363 orang atau 16,52%, sedangkan penduduk yang bekerja

sebagai pegawai negeri berjumlah 1.127 orang atau 13,66%. Penduduk yang bekerja di bidang perdagangan berjumlah 1.286 orang atau 15,57%, dan penduduk yang bekerja sebagai tukang adalah 632 orang atau 7,66%.

#### 4. Kondisi Pendidikan

Pendidikan memegang peranan penting bahwa sangat vital dalam upaya suatu tujuan dari pelaksanaan aktifitasnya selama nilai produktivitas masih dikehendaki, karena pendidikan mencakup konsepsi berbagai ilmu dan pengetahuan yang dapat mengantarkan pada kemajuan. Untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel II.2**  
**Kondisi Pendidikan Penduduk Desa Batu Belah Tahun 2012**

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Jumlah (Jiwa)</b>	<b>(%)</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>	<b>(%)</b>
0 – 14	1.913	17,58	Tidak tamat SD	938	9,49
15 – 25	3.108	28,57	SD/ Sederajat	2.461	24,91
26 – 40	4.635	42,60	SLTP	2.682	27,15
40 – keatas	1.224	11,25	SLTA	3.137	31,75
			Perguruan Tinggi	662	6,70
<b>Jumlah</b>	<b>10.880</b>	<b>100,00</b>		<b>8.253</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Data Kantor Batu Belah Kecamatan Kampar, Tahun 2012

Dilihat dari tingkat pendidikan penduduk Desa Batu Belah dapat dikatakan maju. Hal ini terlihat penduduk yang telah tamat pendidikan SLTA atau sederajat. dapat diketahui bahwa tahun 2011 terdapat jumlah penduduk Batu Belah yang tidak tamat sekolah dasar sebanyak 938 orang atau 9,49%, tamat sekolah dasar sebanyak 2.461 orang atau 24,91%. Selanjutnya tamatan SLTP sebanyak 2.682 orang atau 27,15%, tamat SLTA sebanyak 3.137 orang atau 31,75% dan tamatan perguruan tinggi sebanyak 662 orang atau 6,70%.

## **B. Keberadaan Muhammadiyah dan Tarbiyah Islamiyah di Desa Batu Belah**

Pada mulanya, sebelum Indonesia Merdeka di Desa Batu Belah belum ada satu organisasi keagamaan pun baik Tarbiyah Islamiyah maupun Muhammadiyah. Namun dalam perjalanannya, terjadi perbedaan cara masyarakat dalam peribadatan yang sebagian mengikuti cara/ mazhab Syafi'i yang memakai *qunut* pada saat sholat subuh dan melaksanakan sholat tarawih dengan 20 rakaat dan sebahagian lainnya mazhab Hanafi yang tidak menggunakan *qunut* subuh dan sholat tarawih 8 rakaat. Karena pada waktu itu di Desa Batu Belah hanya ada satu masjid yaitu masjid At-Taqwa maka kedua paham ini melaksanakan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan di satu masjid ini.

Dalam perjalanan waktu berjalan kedua paham ini sulit disatukan dalam satu masjid, maka bagi masyarakat yang mengikuti mazhab Hanafi membangun sebuah masjid yang bernama masjid Al-Muhajirin dibawah naungan organisasi Islam Muhammadiyah. Kemudian bagi warga yang mengikuti mazhab Syafi'i yang tetap melaksanakan sholat dan peribadatan di masjid At- Taqwa mengklaim berada di bawah naungan Tarbiyah Islamiyah. Bila dibandingkan dengan jumlah warga Tarbiyah Islamiyah, warga Muhammadiyah di Desa Batu Belah relatif sedikit, yaitu berkisar hanya 1/3 dari jumlah penduduk yang ada, atau bila dilihat dari komposisi jumlah penduduk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel II.3 berikut ini:

**Tabel II.3**  
**Perbandingan Warga Tarbiyah Islamiyah dan Warga**  
**Muhammadiyah Desa Batu Belah Tahun 2012**

<b>No</b>	<b>Warga</b>	<b>Jumlah Jiwa</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Tarbiyah Islamiyah	5.145	62,34
2	Muhammadiyah	3.108	37,65
<b>Jumlah</b>		<b>8.253</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Kantor Batu Belah Kecamatan Kampar, Tahun 2012

Dalam perjalanannya kedua organisasi ini meskipun menunjukkan adanya kompetisi dalam menunjukkan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat, namun Tarbiyah Islamiyah dan Muhammadiyah telah banyak berkontribusi dalam bidang sosial keagamaan di Desa Batu Belah baik dalam bidang pembangunan, organisasi majelis ta'lim, dan bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan misalnya dapat dilihat dengan banyaknya berdiri sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan kedua organisasi. Tarbiyah Islamiyah mendirikan sekolah PAUD Tarbiyah Islamiyah, TK Tarbiyah Islamiyah, SD Tarbiyah Islamiyah, dan MTs Tarbiyah Islamiyah. Muhammadiyah juga mendirikan PAUD Aisyiah dan SD Muhammadiyah.

**BAB III**  
**LANDASAN TEORI TENTANG PEMILIHAN UMUM**  
**DAN PERILAKU POLITIK KEAGAMAAN DALAM**  
**PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

**A. Landasan Teori Tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah**

**1. Pemilihan Umum**

Suatu proses dan kegiatan memilih itu disederhanakan penyebutannya menjadi pemilihan. Dalam hal pemilihan itu semua rakyat harus ikut, tanpa dibeda-bedakan, maka dipakailah sebutan Pemilihan Umum, disingkat dengan Pemilu.<sup>9</sup> Maka Pemilu berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin negara. Di negara-negara yang demokratis pemilihan merupakan alat untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah dan sistem politik yang berlaku. Dengan hal itu pula, pemilihan tetaplah merupakan bentuk partisipasi politik rakyat yang dianggap paling baik.

Pemilihan Umum adalah mekanisme pergantian kepemimpinan nasional yang secara demokratis melibatkan seluruh masyarakat di suatu negara. Begitu bermaknanya pemilihan umum bagi semua orang, maka pemilihan umum yang menjadi indikator demokratisnya suatu negara. Untuk menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan yang dibentuk melalui mekanisme pemilihan umum, maka keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan sebagai energi demokrasi itu sendiri. Pemilihan umum dengan makna demokratisnya adalah tempat

---

<sup>9</sup> Donald Parulian, *Menggugat Pemilu*, (Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 1997), hlm. 4.

berkompetisinya partai politik yang secara umum dapat menjadi tempat pembelajaran bagi elit dan komponen bangsa lainnya. Selain itu, pemilihan umum juga terkait dengan peran serta masyarakat dalam memberikan dukungan suara kepada kandidat dan partai politik yang ada.<sup>10</sup>

## **2. Pemilihan Umum Kepala Daerah**

Pemilihan Umum Kepala Daerah secara langsung yang diawali setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sekaligus merupakan langkah maju bagi proses demokratisasi lokal di Indonesia. Melalui pelaksanaan otonomi daerah sebagai media untuk menyebarkan sistem demokrasi yang semakin disempurnakan, termasuk melalui pemilihan kepala daerah secara langsung diharapkan memacu tumbuhnya kekuatan yang pro demokrasi di daerah. Artinya melalui pemilihan kepala daerah yang secara langsung ini, akan lahir aktor-aktor demokrasi di daerah, yang kemudian diharapkan mampu melakukan gerakan-gerakan baru bagi perubahan.

Perubahan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden dari sistem perwakilan ke sistem pemilihan langsung merupakan suatu kemajuan signifikan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia yang sedang menjalani masa transisi demokrasi ini. Perubahan tersebut telah sepatutnya diikuti oleh perubahan yang sama pada sistem politik lokal. Pemilihan kepala daerah merupakan momen politik yang telah diadakan serentak semenjak bulan Juni 2005 sebagai eksekusi dari pemilihan presiden langsung untuk alasan penegakan demokrasi lokal di daerah.

---

<sup>10</sup>Doni Hendrik, *Perilaku Memilih Etnis Cina dalam Pemilu tahun 1999 di Kota Padang*, Jurnal Politika Vol. 1, Januari, 2003. (Padang: Tp, 2003), hlm. 52.



Pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung ini menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 diberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah, tidak saja merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tetapi juga diberi kewenangan menyusun semua tata cara yang berkaitan dengan tahap persiapan dan pelaksanaan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005, akan tetapi pemberian wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah sama sekali tidak sedikit pun dikaitkan dengan Komisi Pemilihan Umum Pusat yang menjadi induk Komisi Pemilihan Umum Daerah tersebut seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2003.<sup>11</sup>

### **3. Perangkat Regulasi dan Kelembagaan Pemilihan Kepala Daerah**

Keseriusan pemerintah dalam menangani Pemilihan Kepala Daerah tercermin dari perangkat regulasi dan kelembagaan. Tercatat sederet kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk memuluskan pelaksanaan,<sup>12</sup> seperti :

- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

---

<sup>11</sup> Ramlan Surbakti, *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Oleh Rakyat Merupakan bagian Dari Pemilihan Umum*, dalam <http://www.kpu.go.id/wacana/>, Kamis 21 Juni 2007, hlm. 6.

<sup>12</sup> Syamsul H. Tubani, *Pilkada Bima 2005; Era Baru Demokratisasi Lokal di Indonesia*, Jawa Timur, Bina Swagiri-Fitra Tuban, 2005, hal. ix.

- c. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah Daerah Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .

Pada hakekatnya pemilihan umum merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga pemerintahan guna menjalankan kedaulatan rakyat, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum. Perbedaan sistem pemilihan umum ini banyak tergantung pada dimensi dan pandangan yang ditujukan terhadap rakyat. *Pertama*, apakah rakyat dipandang sebagai individu yang bebas untuk menentukan pilihannya dan sekaligus dapat mencalonkan dirinya sebagai calon wakil rakyat. *Kedua*, apakah rakyat hanya dipandang sebagai anggota kelompok yang sama sekali tidak berhak untuk menentukan siapa wakilnya yang akan duduk dalam lembaga pemerintahan dan ia tidak berhak mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.

Dari perbedaan dimensi dan pandangan diatas, maka sistem pemilihan umum dapat dibedakan menjadi Sistem Pemilihan *Mechanis* dan Sistem Pemilihan *Organis*. Pandangan *Mechanis* menempatkan rakyat sebagai suatu massa individu-individu yang sama sebagai kesatuan otonom dan memandang masyarakat sebagai kompleks hubungan yang bersifat kontraktuil. Berbeda

dengan pandangan organis yang menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan geneologis, fungsi tertentu, lapisan sosial dan lembaga-lembaga sosial.<sup>13</sup>

Berdasarkan sistem pemilihan *mechanis*, dapat dilaksanakan dengan dua cara, yakni Sistem Perwakilan Distrik/ Mayoritas/ *Single Member Constituencies* dan Sistem Perwakilan Proporsional. Karakter utama dari sistem distrik dimana wilayah negara dibagi dalam distrik-distrik pemilihan atau daerah-daerah pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang diperebutkan di badan perwakilan rakyat yang dikehendaki. Dalam sistem proporsional tidak ada pembagian wilayah pemilihan, karena pemilihan bersifat nasional.

Dalam sistem perwakilan proporsional ini dikenal dua sistem yakni *hare system* dan *list system*. Dalam *hare system* atau *single transferable vote* pemilih diberi kesempatan untuk memilih pilihan pertama, kedua, dan seterusnya dari distrik pemilihan yang bersangkutan. Berbeda dengan *list system* pemilih diminta memilih diantara daftar calon yang berisi sebanyak mungkin nama-nama wakil rakyat yang akan dipilih dalam pemilihan umum.

Berbeda dengan sistem pemilihan presiden dimana yang digunakan adalah model *second round past the post* dengan batas minimal perolehan suara 50% plus satu untuk meraih kursi, jika tak ada calon dengan jumlah suara tersebut pada putaran pertama, digelar putaran kedua terhadap dua calon teratas dengan konsekuensi biaya menjadi sangat besar; model penetapan kepala daerah terpilih

---

<sup>13</sup> Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia; Dalam Perspektif Struktural Fungsional*, (Surabaya: SIC, 1998), hlm. 195.

yaitu dari sistem *first past the post* dengan batas minimal perolehan suara 25%. Sesuai dengan Pasal 95 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005, bahwa apabila tidak terpenuhi lebih dari 50% dari jumlah suara sah, maka pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara sah lebih dari 25 % dari seluruh jumlah suara sah, maka pasangan calon yang memperoleh suara tersebar ditetapkan sebagai calon terpilih. Dan prinsip yang dipakai dalam pemilihan kepala daerah adalah prinsip *voluntary voting*, dimana massa pemilih menggunakan hak pilihnya secara sukarela.<sup>14</sup>

Tata kelola (*governance*) pemilihan kepala daerah menyangkut berbagai aspek yang menentukan keberhasilannya yaitu aspek kesiapan masyarakat pemilih, keterampilan petugas lapangan, pendanaan, dan peraturan pemilihan. *Good Governance* adalah pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara demokratis, dengan memberi peluang kepada para calon kepala daerah untuk berkompetisi secara jujur dan adil. Pemilihan Kepala Daerah harus bebas dari segala bentuk kecurangan yang melibatkan penyelenggara pemilihan, mulai dari proses pencalonan, kampanye, sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara. Pemilihan Umum kepala daerah berupaya menghasilkan kepala daerah yang lebih baik, lebih berkualitas, dan memiliki akseptabilitas politik yang tinggi serta derajat legitimasi yang kuat, karena kepala daerah terpilih mendapat mandat langsung dari rakyat.

Penerimaan yang cukup luas dari masyarakat terhadap kepala daerah terpilih sesuai dengan prinsip mayoritas perlu agar kontroversi yang terjadi dalam

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 198.

pemilihan dapat dihindari. Pada gilirannya, pemilihan kepala daerah secara langsung akan menghasilkan Pemerintah Daerah yang lebih efektif dan efisien, karena legitimasi eksekutif menjadi cukup kuat, tidak gampang digoyang oleh legislatif.

*Good governance (Tata Kelola)* Pemilihan Kepala Daerah setidaknya akan menghasilkan enam manfaat penting.<sup>29</sup>

- a. Sebagai solusi terbaik atas segala kelemahan proses maupun hasil pemilihan kepala daerah secara tidak langsung lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999. Pemilihan kepala daerah menjadi kebutuhan mendesak guna menutupi segala kelemahan dalam pemilihan Kepala Daerah pada masa lalu. Pemilihan Kepala Daerah bermanfaat untuk memperdalam dan memperkuat demokrasi lokal, baik pada lingkungan pemerintahan maupun lingkungan kemasyarakatan (*civil society*).
- b. Pemilihan kepala daerah akan menjadi penyeimbang arogansi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selama ini seringkali mengklaim dirinya sebagai satu-satunya institusi pemegang mandat rakyat yang representatif. Dengan demikian akan memposisikan kepala daerah juga sebagai pemegang langsung mandat rakyat, yaitu untuk memerintah (eksekutif).
- c. Pemilihan kepala daerah akan menghasilkan kepala pemerintahan daerah memiliki legitimasi dan justifikasi yang kuat di mata rakyat. Kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah memiliki akuntabilitas publik langsung

kepada masyarakat daerah selaku konstituennya, bukan seperti yang selama ini berlangsung yaitu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan begitu, manuver politik para anggota dewan akan berkurang, termasuk segala perilaku *bad politics*-nya.

- d. Pemilihan kepala daerah berpotensi menghasilkan pemimpin yang lebih bermutu, karena pemilihan langsung berpeluang mendorong majunya calon dan menangnya calon kepala daerah yang kredibel dan akseptabel di mata masyarakat daerah, menguatkan derajat legitimasi dan posisi politik Kepala Daerah sebagai konsekuensi dari sistem pemilihan secara langsung oleh masyarakat.
- e. Pemilihan kepala daerah berpotensi menghasilkan pemerintahan suatu daerah yang lebih stabil, produktif dan efektif. Tidak gampang digoyah oleh ulah politisi lokal, terhindar dari campur tangan berlebihan atau intervensi pemerintah pusat, tidak mudah dilanda krisis kepercayaan publik, dan berpeluang melayani masyarakat secara lebih baik.
- f. Pemilihan kepala daerah berpotensi mengurangi praktek politik uang (*money politics*) yang merajalela dalam proses pemilihan kepala daerah tidak langsung.<sup>15</sup>

## **B. Teori Perilaku Politik**

### **1. Pengertian Perilaku Politik dan Proses Pembentukannya**

Perilaku merupakan sifat alamiah manusia yang membedakannya atas manusia lain, dan menjadi ciri khas individu atas individu yang lain. Dalam

---

<sup>15</sup>Ramlan Surbakti, *Pemilihan Kepala Daerah, Op. Cit*, hlm. 9.

konteks politik, perilaku dikategorikan sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah, dan diantara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakkan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik.

Perilaku politik ialah segala perilaku yang berkaitan dengan proses politik sebagaimana yang dapat dilihat dalam kampanye pemilihan umum, dalam penentuan dukungan yang diberikan dalam pemilihan, dalam pilihan keanggotaan organisasi atau partai politik dan lain-lain sebagainya.<sup>16</sup> Pembentukan perilaku politik dipengaruhi oleh:

- a. Lingkungan sosial politik tak langsung seperti sistem politik, ekonomi, sistem budaya dan media massa;
- b. Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor politik seperti keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan.
- c. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu.
- d. Sosial politik langsung yang berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika akan melakukan suatu kegiatan, seperti cuaca, keadaan keluarga, suasana kelompok dan ancaman dengan segala bentuk.

Pembentukan perilaku politik berlangsung dalam: 1) Organisasi dan Partai Politik 2) Lembaga-lembaga non-formal yang terdapat dalam masyarakat; 3) Lembaga Pendidikan.

---

<sup>16</sup>Ramlam Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, ( Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia 1992), hal.15.

Di tengah masyarakat, individu berperilaku dan berinteraksi, sebagian dari perilaku dan interaksi dapat ditandai akan berupa perilaku politik, yaitu perilaku yang bersangkutan paut dengan proses politik. Sebagian lainnya berupa perilaku ekonomi, keluarga, agama, dan budaya. Termasuk kedalam kategori ekonomi, yakni kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa, menjual dan membeli barang dan jasa, mengkonsumsi barang dan jasa, menukar, menanam, dan menspekulasikan modal. Namun, hendaklah diketahui pula tidak semua individu ataupun kelompok masyarakat mengerjakan kegiatan politik.<sup>17</sup>

## **2. Perilaku Politik dan Perilaku Memilih dalam Pemilihan Umum**

Memilih ialah suatu aktifitas yang merupakan proses menentukan sesuatu yang dianggap cocok dan sesuai dengan keinginan seseorang atau kelompok, baik yang bersifat eksklusif maupun yang inklusif. Memilih merupakan aktifitas menentukan keputusan secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Surbakti menilai perilaku memilih ialah keikutsertaan warga negara dalam Pemilihan Umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam Pemilihan Umum.

Perilaku pemilih merupakan realitas sosial politik yang tidak terlepas dari pengaruh faktor eksternal dan internal. Secara eksternal perilaku politik merupakan hasil dari sosialisasi nilai-nilai dari lingkungannya, sedangkan secara internal merupakan tindakan yang didasarkan atas rasionalitas berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 145.



Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pemilih. Misalnya saja isu-isu dan kebijakan politik, tetapi pula sekelompok orang yang memilih kandidat karena dianggap representasi dari agama atau keyakinannya, sementara kelompok lainnya memilih kandidat politik tertentu karena dianggap representasi dari kelas sosialnya bahkan ada juga kelompok yang memilih sebagai ekspresi dari sikap loyal pada ketokohan figur tertentu. Sehingga yang paling mendasar dalam mempengaruhi perilaku pemilih antara lain pengaruh elit, identifikasi kepartaian sistem sosial, media massa dan aliran politik. Pemilu, sebagai medium pilihan publik, seyogyanya mengkondisikan seluruh pihak yang terlibat untuk belajar berbagi peran sehingga tidak semuanya harus berpusat pada salah satu aktor atau salah satu lokus (Pusat).<sup>18</sup>

Dalam hal ini, proses pemilihan kepala daerah seiring dengan konstalasi politik di era reformasi penguatan demokrasi yang *legitimate* sebagai harapan dari *ending* transisi demokrasi, semakin dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Sebagai konsekuensi logis dari perubahan atmosfir politik tersebut, maka dinamika dan intensitas artikulasi politik pun makin tampak ditengah ranah kehidupan sosial politik.

Secara khusus perubahan yang terjadi dalam sistem pemilu kepala daerah, yakni dari sistem pengangkatan langsung oleh pejabat pusat, kemudian menjadi sistem pemilihan perwakilan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang senantiasa mengandung kultur *vested interest* (kepentingan pribadi) di

---

<sup>18</sup>Ahmad Nadir. *Pilkada Langsung Dan Masa Depan Demokrasi*, (Malang : Averroes Press 2005), hal 39.

kalangan elit, dan akhirnya menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian, pemilu kepala daerah secara langsung merupakan indikator pengembalian hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen politik lokal secara demokratis.<sup>19</sup>

Para ilmuwan politik kontemporer berpandangan bahwa perilaku politik berarti suatu kegiatan yang berkenaan dengan proses dan pelaksanaan keputusan politik dan yang melakukan kegiatan tersebut ialah pemerintah dan masyarakat. Warga negara memang tidak memiliki fungsi menjalankan pemerintahan, tetapi mereka memiliki hak untuk mempengaruhi orang yang menjalankan fungsi pemerintahan.<sup>20</sup>

Salah satu wujud dari perilaku sosial dalam kehidupan masyarakat adalah perilaku politik sebagai perilaku yang bersangkutan paut dengan proses politik, untuk membedakannya dari perilaku ekonomi, keluarga, agama dan budaya. Sedangkan politik adalah interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah.

Secara lebih rinci Popkin membedakan antara pilihan politik sebagai wujud perilaku politik dengan pilihan pribadi terhadap produk-produk konsumtif sebagaimana dalam perilaku ekonomi. Menurutnya ada empat hal yang membedakan perilaku tersebut. *Pertama*, memilih kandidat politik tidak langsung dirasakan manfaatnya sebagaimana pilihan terhadap pilihan konsumtif, melainkan manfaatnya diperoleh dimasa depan. *Kedua*, pilihan politik merupakan tindakan

---

<sup>19</sup>Ambo Upe, *Sosiologi Politik Kontemporer*, (Jakarta, Prestasi pustaka, 2008), hlm. 44-45.

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 109.

kolektif dimana kemenangan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak. Jadi pilihan seseorang senantiasa mempertimbangkan pilihan orang lain. *Ketiga*, pilihan politik senantiasa diperhadapkan dengan ketidakpastian utamanya politisi untuk memenuhi janji politiknya. *Keempat*, pilihan politik membutuhkan informasi yang intensif demi tercapainya manfaat dimasa depan. Dari beberapa karakteristik tentang perilaku memilih tersebut, yang tentunya akan berimplikasi dalam pemberian suara pada proses pemilihan umum (Pemilu).<sup>21</sup>

Menurut Jung membedakan dua tipe karakter utama pemilih yang *ekstrovert* dan *introvert*. Introvert berbalik kedalam diri manusia itu sendiri, kepada dunia ide tidak peduli dengan pendapat orang lain seorang *ekstrovert* berminat dengan sesuatu yang berada disekirarnya, dalam kekayaan, prestise, persetujuan sosial, dan konformitasi.<sup>22</sup>

Pendekatan perilaku pemilih dalam kehidupan suatu masyarakat selalu terdapat pola-pola dan cara-cara tertentu yang dianut oleh warga masyarakat. Pola dan cara-cara tersebut merupakan tingkah laku masyarakat itu dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang sukarela atau dengan terpaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan yang diharapkannya, maka keputusan yang diambilnya itu amat dipengaruhi oleh pola dan cara fikir yang dianutnya. Hal tersebut diatas tentu tidak bisa dilepaskan dari kondisi psikis dan pola pikir tokoh masyarakat, terlebih lagi oleh kuatnya dorongan dalam rangka memperebutkan ataupun mempertahankan sumber-sumber yang dianggap perlu.

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 110.

<sup>22</sup> Kacung Marijan, [Blog at wordpress.com](http://Blog.at.wordpress.com).

Pola dan cara berfikir menurut tokoh masyarakat itu sendiri lahir, tumbuh, dan berkembang sebagai pedoman dalam kebudayaan yang ada dalam pergaulan hidup sehari-hari dengan anggota masyarakat lainnya tidak dapat disangkal bahwa manusia mempunyai bentuk-bentuk karakteristik yang terwujud dalam kelompok-kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi dan kekuasaan. Dengan demikian, dalam melihat perilaku politik seseorang perlu menggunakan beberapa pendekatan.

### **3. Analisis Perilaku Pemilih**

Dalam menganalisis perilaku pemilih dapat digunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan rasional. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

#### ***a. Pendekatan Sosiologis***

Pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan pilihan pemilih. Pendekatan sosiologis dilandasi oleh pemikiran bahwa determinan pemilih dalam respon politiknya adalah status sosio-ekonomi, afiliasi religius.

Dengan kata lain, pendekatan ini didasarkan pada ikatan sosial pemilih dari segi etnik, ras, agama, keluarga dan pertemanan yang dialami oleh agen pemilih secara historis. Pengelompokan sosial seperti umur (tua-muda), jenis kelamin (laki-perempuan) agama dan semacamnya dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk pengelompokan sosial baik secara formal seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi-organisasi keagamaan,

organisasi-organisasi profesi, dan sebagainya, maupun kelompok-kelompok informal seperti keluarga, pertemuan, ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya, merupakan sesuatu yang sangat vital dalam memahami perilaku politik seseorang, karena kelompok-kelompok inilah yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam menentukan sikap, persepsi dan orientasi seseorang.

***b. Pendekatan Psikologis***

Pendekatan psikologis pada dasarnya melihat sosialisasi sebagai determinasi dalam menentukan perilaku politik pemilih, bukan karakteristik sosiologis. Pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang merupakan refleksi dari keperibadian seseorang yang menjadi variabel yang cukup menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang.

Oleh karena itu, pendekatan psikologi menekankan pada tiga aspek psikologis sebagai kajian utama, yaitu ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi terhadap kandidat. *Pertama*, sikap merupakan fungsi kepentingan, artinya penilaian terhadap suatu objek diberikan berdasarkan motivasi, minat dan kepentingan orang tersebut; *Kedua*, sikap merupakan fungsi penyesuaian diri artinya seseorang bersikap tertentu merupakan akibat dari keinginan orang itu untuk sama atau tidak sama dengan tokoh yang dijadikan panutan; *Ketiga*, sikap merupakan fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri, artinya sikap seseorang itu merupakan upaya untuk mengatasi konflik batin dan tekanan psikis dan eksternalisasi diri seperti proyeksi, idealisasi, rasionalisasi dan identifikasi.

Kedua pendekatan tersebut diatas melihat bahwa perilaku pemilih bukanlah keputusan yang dibuat pada saat menjelang atau ketika berada dibilik suara, tapi sudah ditentukan jauh sebelumnya, bahkan sebelum kampanye dimulai. Oleh karena itu tidak cukup menjelaskan perilaku politik dengan hanya menggunakan kedua pendekatan tersebut, tetapi juga dibutuhkan pendekatan rasional.

### ***c. Pendekatan Rasional***

Melihat bahwa pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan penilaiannya terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan, artinya para pemilih dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional. Dengan demikian, perilaku pemilih berdasarkan pertimbangan rasional tidak hanya berupa memilih alternative yang paling menguntungkan (*maximum gained*) atau mendatangkan kerugian yang paling sedikit, tetapi juga dalam memilih alternatif yang menimbulkan resiko yang paling kecil yang penting mendahulukan selamat.

Oleh karena itu, diasumsikan para pemilih mempunyai kemampuan untuk menilai isu-isu politik yang diajukan, begitu juga mampu menilai calon (kandidat) yang ditampilkan. Penilaian rasional terhadap isu politik atau kandidat ini dapat didasarkan pada jabatan, informasi dan pribadi yang populer atas prestasi yang dimilikinya.

Beberapa pendekatan diatas sama-sama berasumsi bahwa memilih merupakan kegiatan yang otonom, dalam arti tanpa desakan dan paksaan dari pihak lain. Namun, dalam kenyataan di negara-negara berkembang perilaku memilih bukan hanya ditentukan oleh pemilih sebagaimana disebutkan oleh

beberapa pendekatan diatas, tetapi dalam banyak hal justru ditentukan oleh tekanan kelompok, intimidasi, dan paksaan dari kelompok atau pemimpin tertentu.

Tokoh masyarakat yang memandang kelompok atau publik lebih penting daripada definisi situasi yang diberikan oleh individu cenderung mempersukar individu untuk membuat keputusan yang berbeda ataupun bertentangan dengan pendapat kelompok atau negara tersebut. Oleh karena itu, perilaku memilih di beberapa Negara berkembang harus pula ditelaah dari segi pengaruh kepemimpinan terhadap pilihan pemilih.

Kepemimpinan yang dimaksud berupa kepemimpinan tradisional (kepala adat dan kepala suku), religius (pemimpin agama), patron-klien (tuan tanah-buruh penggarap), dan birokratik-otoriter (para pejabat pemerintah, polisi, dan militer). Para pemimpin ini tidak selalu berupa persuasi, tetapi acap kali berupa manipulasi, intimidasi, dan ancaman paksaan. Proses pendekatan diatas tentunya akan berdampak pula pada perkembangan perilaku memilih di Kabupaten Kampar yang masih sangat dipengaruhi oleh semangat kedaerahan yang tinggi, serta para tokoh masyarakat lokal yang menjadi patron di daerah tersebut.

Terdapat sejumlah kondisi yang memunculkan fenomena kedua itu. Kondisi yang pertama berkaitan dengan kesadaran para pemilih bahwa politisi yang pada akhirnya memperoleh kekuasaan atas dukungan yang mereka berikan tersebut telah menikmati kekuasaan yang berdurasi cukup lama. Tetapi di balik itu semua, terdapat keinginan agar orang-orang yang memperoleh materi tersebut memilih calon itu. Demokrasi memang tidak bisa dilepaskan dari transaksi, antara

yang memilih dan yang dipilih. Tetapi, di dalam demokrasi yang sehat, transaksi itu tidak berwujud material yang diberikan kepada pribadi-pribadi (*private*), melainkan kepada masyarakat umum (*public*). Yang terakhir ini, misalnya, berbentuk ikatan tentang kebijakan-kebijakan yang akan dibuat manakala calon tersebut benar-benar terpilih.

Transaksi material bisa mengarah kepada kehidupan demokrasi yang tidak sehat. *Pertama*, transaksi itu bersifat sesaat: calon memberikan sesuatu dan penerima memilihnya. Setelah itu, bisa selesai begitu saja. Konsekuensinya, disconnect electoral terjadi. Calon yang terpilih bisa saja tidak merasa harus memiliki akuntabilitas kepada pemilih. Hal demikian membawa implikasi adanya relasi yang tidak sehat antara pejabat terpilih itu dan para pemilihnya. *Kedua*, perilaku transaksional semacam itu cenderung hanya membuka ruang kepada orang-orang yang memiliki kekayaan besar saja yang berkesempatan menjadi elite. Minimal, hanya memberikan ruang kepada calon yang mampu mengumpulkan sumbangan dari orang-orang berduit saja. Konsekuensi semua itu, sifat kekuasaan cenderung bercorak oligarkis.

Dalam model demikian, kekuasaan lebih banyak dinikmati sekelompok kecil orang saja. Sekiranya hal seperti itu yang terjadi, tujuan pilkada secara langsung menjadi sulit diwujudkan. Selain agar proses pemilihan kepala daerah berlangsung secara demokratis, mekanisme demikian dimaksudkan agar alokasi dan distribusi sumber-sumber untuk publik bisa berlangsung secara adil dan menguntungkan banyak pihak. Tetapi, kalau Pilkada langsung itu hanya memproduksi kekuasaan yang bercorak oligarkis, alokasi dan distribusi sumber-



sumber daerah hanya akan lebih banyak menguntungkan sekelompok kecil orang tertentu saja.

Situasi seperti itu bisa berubah manakala perilaku transaksi material tersebut berubah menjadi transaksi kebijakan. Para pemilih menentukan pilihannya bukan karena para calon telah memberikan imbalan material, melainkan mampu memberikan imbalan berupa kebijakan publik yang menguntungkan. Selain itu, perlu ada desain ulang pilkada secara langsung untuk meminimalisasi biaya tinggi dan berlangsungnya praktik transaksi material. Misalnya, perlu ada pembatasan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh semua pasangan calon dan adanya sanksi yang berat kepada pelaku *money politics*. Perilaku memilih tokoh masyarakat dilatar belakangi oleh adanya kondisi psikologis yang merupakan faktor paling berperan dalam perilaku memilih tokoh masyarakat.

Kalau kita melihat dan mengamati beberapa pandangan mengenai perilaku memilih dan peran tokoh masyarakat dalam pentas politik lokal/ pilkada yang berlangsung, tentunya menarik untuk di teliti guna memperdalam kajian mengenai demokrasi lokal/ kedaerahan yang dewasa ini, menjadi pesta politik diseluruh daerah di Indonesia. Tetapi sistem desentralisasi yang terakomodasi dalam pilkada, tentunya melahirkan suatu potensi konflik.

Menurut Maswadi Rauf, bahwa konflik adalah suatu gejala sosial yang selalu terdapat didalam setiap masyarakat dari setiap kurun waktu. Konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat, karena konflik merupakan salah satu produk dari hubungan sosial (*social relation*)

karena masyarakat terdiri dari sejumlah besar hubungan sosial , selalu saja terjadi konflik antara warga-warga masyarakat yang terlibat dalam hubungan sosial.<sup>23</sup>

Hal tersebut diatas tentunya memicu suatu ketegangan sosial yang berimplikasi pada disharmonisasi kehidupan bermasyarakat, sehingga ketegangan sosial tersebut pun memicu kembali semangat etnosentrisme. Achmad Habib berpendapat bahwa pada dasarnya setiap kebudayaan dalam masyarakat hampir selalu memiliki sifat ethnosentris. Konflik sosial yang teradapat dalam masyarakat tentunya tidak bisa dilepaskan dari sifat etnosentris yang inheren didalam diri individu, yang kemudian melahirkan antagonisme etnis yang oleh Persell dihipotesiskan akan terjadi bila ada sejumlah prasyarat, yaitu: *Pertama*, adanya dua atau lebih kelompok etnik yang berbeda. *Kedua*, adanya perbedaan praktek budaya dan cirri-ciri fisik kelompok yang bias dikenali. *Ketiga*, adanya persaingan antar berbagai kelompok untuk mendapatkan barang-barang atau sumber-sumber yang terbatas. *Keempat*, adanya ketimpangan distribusi kekuasaan dan sumber daya pada berbagai kelompok yang bersaing. Hal tersebut meniscayakan adanya potensi konflik yang nyata didalam masyarakat, sehingga benturan tersebut tidak dapat dihindarkan.<sup>24</sup>

Terlepas dari apakah keempat kondisi prasyarat tersebut semuanya terpenuhi atau tidak, kerusuhan antar etnik seolah-olah terus mengikuti dinamika sejarah perpolitikan di Indonesia. Etnik sebagai sekelompok manusia yang mempunyai kebudayaan sama, berkembang dari ranah biologis menuju ranah

---

<sup>23</sup>Maswadi Rauf, *Konsensus & Konflik Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2001), hlm. 72.

<sup>24</sup> Achmad Habib, *Konflik Antar Etnik di Pedesaan*, (Yogyakarta: PT. LKiS, 2004), hlm. 183.

kebudayaan dan akhirnya bermuara pada ranah politik. Aspek sosio-politik tentang etnik ini belakangan disebut etnisitas.<sup>25</sup>

Dalam hal ini sedikitnya ada dua macam tingkatan konflik yang mungkin terjadi, yakni : (1) konflik dalam tingkatan yang bersifat ideologis, (2) konflik didalam tingkatan yang bersifat politis. Pada tingkatan yang bersifat ideologis, konflik tersebut terwujud didalam bentuk konflik antara system nilai yang dianut serta menjadi ideology dari berbagai kesatuan sosial. Pada tingkatan yang bersifat politis, konflik tersebut terjadi dalam bentuk pertentangan didalam pembagian status kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi yang terbatas adanya didalam masyarakat.<sup>26</sup>

Menurut teori Neil J. Smelser yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang menjadi sumber ketegangan yakni (*struktural condusiveness, struktural strain*), yang kemudian diikuti oleh adanya penyebaran kepercayaan dan kebencian. Disinilah, intervensi politik, aktivis maupun kepentingan elit, seringkali menumpangi proses-proses ketegangan, sehingga merambat menjadi kebencian dan tindakan-tindakan anarkis.<sup>27</sup>

### **C. Perilaku Tokoh Masyarakat dan Politik Kegamaan**

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, tokoh diartikan sebagai rupa, wujud dan keadaan, bentuk dalam arti jenis badan, perawakan, orang yang terkemuka atau kenamaan didalam lapangan politik suatu masyarakat. Sedangkan masyarakat, ialah sekumpulan individu atau sejumlah manusia yang terikat dalam

---

<sup>25</sup> Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2006), hlm. 88.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 91.

<sup>27</sup> Maswadi Rauf, *Loc, Cit*, hlm. 73.

satu kebudayaan yang sama. Menurut Surbakti mengatakan bahwa tokoh masyarakat ialah seseorang yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat dan dapat menjadi faktor yang menyatukan suatu bangsa-negara.<sup>28</sup>

Tokoh masyarakat, tentunya merupakan representasi dari adanya sifat-sifat kepemimpinan yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam mewujudkan harapan serta keinginan-keinginan masyarakat sehingga tokoh masyarakat, tidak bisa dilepaskan dari sifat kepemimpinan yang tercermin didalam diri tokoh masyarakat tersebut. Kepemimpinan ini kemudian menjadi panutan, sebab warga masyarakat mengidentifikasikan diri kepada sang pemimpin, dan ia dianggap sebagai penyambung lidah masyarakat.

Berdasarkan masyarakat yang tengah membebaskan diri dari belenggu penjajahan, biasanya muncul pemimpin yang kharismatik untuk menggerakkan massa rakyat mencapai kemerdekaannya. Kemudian pemimpin ini muncul sebagai simbol persatuan bangsa, seperti tokoh dwitunggal Soekarno-Hatta di Indonesia dan Joseph Bros Tito di Yugoslavia. Dalam hal ini tokoh masyarakat adalah merupakan orang-orang yang dihormati dan disegani dalam masyarakatnya. Karena aktifitas dalam kelompoknya serta kecakapan-kecakapan dan sifat-sifat tertentu yang dimilikinya.<sup>29</sup>

Pemimpin saja mungkin tidak menjamin bagi terbentuknya suatu bangsa-negara sebab pengaruh pemimpin bersifat sementara. Dalam hal ini ada dua penyebab, *pertama*, umur manusia (pemimpin) terbatas, dan khususnya pemimpin kharismatik tidak dapat di wariskan. Pemimpin tidak hanya yang masih hidup

---

<sup>28</sup>Ramlam Surbakti, *Memahami Ilmu Politik... Loc. Cit*, hlm.19.

<sup>29</sup><http://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 26 April 2012 Pukul 09: 46.

dapat berfungsi sebagai symbol persatuan bangsa, tetapi juga yang sudah menjadi pahlawan. Namun, sifat permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat memerlukan tipe kepemimpinan yang sesuai. *Kedua*, tipe kepemimpinan berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat. Masyarakat yang berubah menghendaki tipe pemimpin yang berubah pula.

Pada pihak lain tidak hanya di negara-negara berkembang seorang pemimpin kharismatik dipandang sebagai simbol persatuan bangsa, tetapi juga di Negara-negara yang maju seorang pemimpin diharapkan tampil sebagai “wakil” atau personifikasi bangsa di dalam maupun di luar negeri.<sup>30</sup>

Ketokohan tersebut merupakan aktualisasi dari masyarakat yang mendambakan sosok pemimpin yang kharismatik, yang memungkinkan tercapainya keinginan dan harapan masyarakat di daerah tempatnya bermukim. Masyarakat tentunya menurut Wikipedia bahasa Indonesia,<sup>31</sup> Masyarakat (sebagai terjemahan istilah *society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah system semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.

Kata masyarakat sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, “*musyarak*”. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar orang-perorang. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, sekelompok manusia dapat dikatakan

---

<sup>30</sup>Ramlam Surbakti, *Memahami Ilmu Politik... Op. Cit*, hlm. 22.

<sup>31</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>

sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan. Masyarakat dapat pula diorganisasikan berdasarkan struktur politiknya: berdasarkan urutan kompleksitas dan besar, terdapat masyarakat band, suku, chiefdom, dan masyarakat negara.<sup>32</sup>

Kata *society* berasal dari bahasa latin *societas*, yang berarti hubungan persahabatan dengan yang lain. *Societas* diturunkan dari kata *socius* yang berarti teman, sehingga arti *society* berhubungan erat dengan kata sosial. Secara implisit, kata *society* mengandung makna bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama. Korelasi antara ketokohan didalam masyarakat, dengan masyarakat itu sendiri. Dari sejumlah asumsi dasar tersebut maka secara esensial pendekatan secara sosiologis ini mengkaji kehidupan sosial manusia sebagai berikut:

Masyarakat merupakan sistem yang kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan tergantung satu sama lain, serta setiap bagian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian lainnya. Setiap bagian dari suatu masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan dirinya yaitu mekanisme yang dapat merekatkannya menjadi satu. Mekanisme ini adalah komitmen para anggota masyarakat kepada serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama. Masyarakat cenderung mengarah pada suatu keseimbangan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

(*equilibrium*) dan gangguan pada salah satu bagiannya cenderung menimbulkan penyesuaian pada bagian lain agar tercipta harmoni atau stabilitas.<sup>33</sup>

Masyarakat adalah kumpulan individu yang tinggal pada satu wilayah. Kumpulan individu ini mempunyai karakteristik tersendiri yang dapat dibedakan dengan masyarakat lain. Ia mencoba memahami tingkah laku individu dalam masyarakat, dan tingkah laku masyarakat sebagai kumpulan individu dengan kelompok masyarakat yang lain. Ia mencoba memahami, meneliti, menemukan perbedaan dan persamaan interaksi individu dalam masyarakat dan interaksi masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain.<sup>34</sup>

Setiap masyarakat senantiasa mempunyai penghargaan tertentu terhadap hal-hal tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan. Penghargaan yang lebih tinggi terhadap hal-hal tertentu, akan menempatkan hal tersebut pada kedudukan yang lebih tinggi dari hal-hal lainnya<sup>35</sup> Selama dalam suatu masyarakat ada sesuatu yang dihargai, dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargai, sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem lapisan dalam masyarakat itu. Sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat dapat berupa uang atau benda-benda yang bernilai ekonomis, tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan dalam agama atau mungkin juga keturunan yang terhormat.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup>[www.Wikipedia.Com](http://www.Wikipedia.Com)

<sup>34</sup>Ng. Philipus, dan Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 231.

<sup>35</sup>Soerjono soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 197.

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm. 199.

Hal tersebut menjadi salah satu faktor timbulnya pelapisan dalam masyarakat/ stratifikasi sosial. Stratifikasi dapat terjadi dengan sendirinya sebagai bagian dari proses pertumbuhan masyarakat, juga dapat dibentuk untuk tercapainya tujuan bersama. Faktor yang menyebabkan stratifikasi sosial dapat tumbuh dengan sendirinya adalah kepandaian, usia, sistem kekerabatan, dan harta dalam batas-batas tertentu.<sup>37</sup>

Tokoh masyarakat yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri merupakan instrumen politik yang sangat erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat terutama masyarakat yang masih berada pada lingkungan pedesaan. Peran ini kemudian menjadi factor yang signifikan didalam proses memilih pemimpinnya. Dalam konteks Pilkada di Kabupaten Kampar, peran tokoh masyarakat dalam organisasi keagamaan tentunya banyak mempengaruhi tingkah laku memilih masyarakat, dikarenakan bahwa tokoh masyarakat tersebut adalah orang-orang yang memiliki loyalitas dan kemampuan dalam memimpin masyarakat.

Pada hakikatnya tokoh masyarakat ialah orang yang mempunyai peranan yang besar dalam suatu kelompok masyarakat dan memiliki kekuasaan yaitu kemampuan mempengaruhi orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dirinya.<sup>38</sup> Tentu saja ketokohan seseorang dalam masyarakat, tidak bisa dilepaskan dengan suatu kekuasaan. Sejarah menunjukkan bahwa banyak kejadian diwarnai dari segi kepemimpinan seorang tokoh masyarakat.

---

<sup>37</sup> Pratikno, Blog at Wordpress.com, diakses pada tanggal 27 April 2012 pukul 13.50.

<sup>38</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar ilmu politik*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2003), hlm. 10.



Dalam kaitannya dengan hubungan sosial-budaya dari perspektif ilmu sosial biasa disebut dengan budaya paternalistik, di mana peran seorang tokoh/ elit dalam masyarakat desa adalah sangat dominan dalam hubungan-hubungan sosial maupun dalam ranah politik yang bertalian dengan pengambilan kebijakan pada aras desa. Sementara itu, apa yang disebut dengan elit desa setidaknya dapat dipilah menjadi beberapa jenis elit, diantaranya elit pemerintahan, elit agama, elit ekonomi, elit ormas, elit intelektual, dan elit adat sebagai para stakeholders dengan fungsi dan peranan yang berbeda-beda.

Elit pemerintahan ditunjukkan dengan adanya kepala desa, kepala dusun, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya. Elit agama adalah tokoh panutan dalam agama seperti kyai, ustadz, pendeta, romo, dan tokoh agama lainnya. Elit ekonomi adalah golongan yang kaya secara ekonomi di desa termasuk para pemilik lahan. Elit Ormas merupakan tokoh dalam organisasi kemasyarakatan atau politik yang ada di desa, elit intelektual adalah ditokohkan karena kecerdasan dan kepandaianya atau karena pendidikannya, sedangkan mereka bisa berprofesi guru, pegawai/pejabat pemerintahan, sedangkan elit adat merupakan tokoh yang sangat dihormati dalam tradisi-tradisi atau adat setempat yang masih hidup dalam keseharian masyarakat pedesaan.

Berkenaan dengan posisi mereka sebagai elit desa, sangat mungkin mereka menyanggah lebih dari 1 (satu) jenis elit, misalnya seorang kepala desa selain elite pemerintahan juga sebagai elit ekonomi dan elit agama, begitu pula untuk tokoh/ elit yang lain. Kecenderungan seseorang untuk ditokohkan ialah kemampuan-kemampuan dalam berbagai hal yang terwujud lewat perilaku kehidupan

praktisnya. Selain itu karena berbagai kelebihan yang dimiliki serta kecakapan dalam bertindak dan tentunya kemampuan intelektual, spiritual, serta komunikasinya. Manusia-manusia yang terlahir sebagai sosok cakap dalam berbagai kemampuan, kemudian menjadi perhatian masyarakat sebagai sosok yang dalam pandangan umum masyarakat sebagai manusia yang dapat dijadikan panutan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paradigma Warga Muhammadiyah dan Tarbiyah Islamiyah Desa Batu Belah Dalam Memilih Pemimpin**

Proses pemilihan kepala daerah Kabupaten Kampar tahun 2011, membawa peran serta dua organisasi yang ada di Desa Batu Belah Kecamatan Kampar yaitu Muhammadiyah dan Tarbiyah Islamiyah dalam pergulatan politik lokal. Peranan tokoh Muhammadiyah dan Tarbiyah Islamiyah tersebut kemudian mendapat perhatian berbagai partai politik besar guna sebagai mesin pendongkrak suara bagi pasangan calon.

Organisasi Muhammadiyah dan Tarbiyah Islamiyah Desa Batu Belah mengandalkan beberapa orang tokoh masyarakat yang dianggap mampu dalam mewakili harapan dan keinginan masyarakat. Ketokohan Muhammadiyah dan Tarbiyah Islamiyah dalam masyarakat merupakan representasi atau perwakilan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Di Desa Batu Belah, terdapat dua organisasi besar yaitu Muhammadiyah dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Secara historisnya kedua organisasi besar ini berasal dari dua kubu yang berbeda. Muhammadiyah mewakili kubu modernis yang berbasis urban/ kota, pedagang atau pegawai, sedangkan Persatuan Tarbiyah Islamiyah mewakili kubu tradisionalis berbasis pedesaan, agraris, dan pesantren.<sup>1</sup> Dalam perkembangannya, Muhammadiyah memainkan fungsi sebagai gerakan sosial dan

---

<sup>1</sup>Suwarno, *Muhammadiyah Sebagai Oposisi*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 1.

politik. Hal ini dapat dilihat pada sikap organisasi yang berusaha untuk menciptakan sebuah struktur masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.<sup>2</sup>

Untuk melihat perbedaan paradigma kedua organisasi dapat penulis sajikan hasil penelitian sebagai berikut:

### **1. Paradigma Warga Muhammadiyah**

Secara historis keterlibatan Muhammadiyah dalam dunia politik sudah dimulai semenjak pembentukan organisasi ini, dimana Ahmad Dahlan dan beberapa tokoh pendiri Muhammadiyah lainnya seperti H.A. Hasan Zaenal, H. Zadzuli, dan lain-lainnya, pernah terlibat langsung dan ikut aktif dalam gerakan yang bernuansa politik. Dalam Sarekat Islam (SI) yang berdiri tahun 1912, aktivitas Ahmad Dahlan dapat ditunjukkan seperti pada tahun 1913 yang duduk sebagai komisaris dalam Central SI, dan hingga 1918 dia diangkat sebagai penasihat agama pada sentral SI. Hubungan Muhammadiyah dengan SI masih tetap erat sampai tahun 1926/1927.<sup>3</sup>

Pada masa pemerintahan Orde Baru, tokoh-tokoh Muhammadiyah juga banyak terlibat dalam partai politik. Memang pada masa ini, Muhammadiyah tidak lagi mempunyai kendaraan politik resmi untuk para elitnya. Sebab saat ini, Muhammadiyah kembali kepada komitmen semula untuk bersikap netral, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak memiliki afiliasi politik terhadap partai politik atau organisasi apa pun.<sup>4</sup> Artinya, secara kelembagaan Muhammadiyah tidak punya lagi “tangan politik” berupa partai politik yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi dan kepentingan para elit serta warga

---

<sup>2</sup> Masyarakat utama atau disebut dengan masyarakat madani atau *civil society*, lihat Suwarno, *Ibid*, hlm. 46.

<sup>3</sup> Surbakti, *Memahami ilmu politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 1992), hlm. 45.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 47

Muhammadiyah. Namun dalam hal partisipasi politik, para anggota Muhammadiyah diberi keleluasaan untuk aktif di partai politik yang sesuai dengan hati nuraninya, terutama yang memperjuangkan kesejahteraan dan tegaknya keadilan.<sup>5</sup>

Paradigma warga Muhammadiyah dalam memilih pemimpin pada tingkat daerah, khususnya di Desa Batu Belah, langkah politisnya tidak jauh berbeda dengan kondisi di tingkat Pusat. Dalam penelitian ini, langkah politis diklasifikasikan atas dua orientasi, yaitu orientasi politis struktural dan orientasi politis kultural. Orientasi politis struktural atau politik yang berorientasi kekuasaan dilakukan melalui alat-alat kekuasaan dan mobilisasi massa.

Orientasi politis kultural dijelaskan melalui dua sifat, yaitu : *Pertama*, inklusivitas, yaitu Muhammadiyah bersifat mengayomi partai politik yang ada, dan menjaga kedekatan dengan partai politik untuk berjuang bersama-sama dalam membangun masyarakat. *Kedua*, sifat horizontal, yaitu Muhammadiyah melakukan strategi pengembangan amal usaha yang dikembangkan secara merata, dan juga melalui metode dakwah baik formal maupun informal. Sebagai organisasi Islam, Muhammadiyah terlibat aktif dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang politik.

Orientasi politik struktural warga Muhammadiyah di Desa Batu Belah lebih mendominasi dibandingkan orientasi politik kultural. Hal ini ditandai dengan keterlibatan Muhammadiyah dalam dinamika politik di Desa Batu Belah, khususnya dalam proses pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Daerah. Namun, Muhammadiyah tetap menjalankan fungsinya sebagai organisasi sosial keagamaan dengan tetap menjalankan orientasi kulturalnya. Sedangkan aspek yang memengaruhi

---

<sup>5</sup> Wikipedia.org/wiki/masyarakat. Diakses dari [www.google.co.id](http://www.google.co.id), pada tanggal tanggal 28 April 2012 pukul 9.15.

orientasi politik tersebut adalah situasi sosial dan politik masyarakat yang makin politis, sikap politik warga Muhammadiyah yang membawa kepentingannya terlibat dan terkonsentrasi terhadap masalah politik. Perubahan orientasi politik juga membawa implikasi terhadap dinamika Muhammadiyah Desa Batu Belah, yaitu ketidakpercayaan warga Muhammadiyah terhadap strategi *high politic*, dan membangkitkan kesadaran warga dan pimpinan Muhammadiyah untuk kembali ke *khittahnya* sebagai organisasi sosial keagamaan.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kampar, warga Muhammadiyah Desa Batu Belah, sebagai organisasi non-politik, tidak begitu terlibat dalam politik praktis terhadap salah satu pasangan calon, meskipun sebenarnya H. Jefry Noer merupakan salah satu pasangan yang berasal dari Organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah Desa Batu Belah melalui *khittahnya* menegaskan bahwa: *Pertama*, Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat sehingga tidak mempunyai hubungan organisatoris dan bukan merupakan afiliasi dari suatu partai politik; *Kedua*, setiap warga Muhammadiyah, sesuai dengan hak asasinya, bebas untuk menyalurkan aspirasi melalui organisasi lain atau partai politik.

Dari komitmen ini jelas bahwa persoalan politik sepenuhnya diserahkan kepada naluri politik masing-masing warga. Hubungan Muhammadiyah dan politik yang bersifat personal tidak terlibat langsung karena tidak tegas coraknya. Pada kasus-kasus tertentu, terdapat proses dalam tubuh organisasi Muhammadiyah sendiri yang menunjukkan keterlibatan dalam pembentukan dan dukungan partai politik yang dibidani oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah Desa Batu Belah. Pada kasus lain,

keterlibatan itu bersifat praktis dan hanya melibatkan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Keterlibatan para elit Muhammadiyah Desa Batu Belah melahirkan hubungan yang intensif dan dinamis, di mana secara individu warga Muhammadiyah dapat memainkan peran politiknya sesuai dengan aspirasi politiknya. Secara kelembagaan, Muhammadiyah memberi kebebasan kepada warganya.

Selain itu, Organisasi Muhammadiyah Desa Batu Belah berpendapat, dengan tidak berpihaknya warga Muhammadiyah terhadap salah satu pasangan calon disebabkan karena mengingat banyaknya dampak yang diterima oleh organisasi Muhammadiyah, seperti: *Pertama*, Warga Muhammadiyah akan diklaim bergabung dengan salah satu partai (seperti PAN), hal tersebut akan dicap sebagai partainya orang Muhammadiyah dan di luar Muhammadiyah akan menjaga jarak dan akhirnya partai tersebut tidak berkembang, karena hanya akan diisi oleh warga Muhammadiyah, dan mereka tidak dapat mengembangkan sayap kepada kelompok lain; *Kedua*, Muhammadiyah akan terkena imbas ketika tokoh yang didukung nantinya tersebut bermasalah sehingga akan merugikan Muhammadiyah secara kelembagaan (organisasi).

## **2. Paradigma Tarbiyah Islamiyah**

Organisasi Islam di Indonesia pada umumnya dan di tingkat daerah pada khususnya merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dipelajari, mengingat bahwa organisasi Islam merupakan representasi dari umat Islam yang menjadi mayoritas di Indonesia. Hal ini menjadikan organisasi Islam menjadi sebuah kekuatan sosial maupun politik yang diperhitungkan dalam pentas politik. Dari aspek kesejarahan, dapat ditangkap bahwa kehadiran organisasi-organisasi Islam baik itu

yang bergerak dalam bidang politik maupun organisasi sosial membawa sebuah pembaruan bagi bangsa, seperti kelahiran Serikat Islam sebagai cikal bakal terbentuknya organisasi politik, Muhammadiyah, NU (Nahdlatul Ulama), Serikat Dagang, dan lain-lainnya pada masa pra kemerdekaan membangkitkan sebuah semangat pembaruan yang begitu mendasar di tengah masyarakat. Di samping itu, terbentuknya berbagai organisasi ini memberikan akses terhadap kesadaran untuk memperjuangkan nasib sendiri melalui instrumen organisasi keagamaan.

Dalam bidang politik, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) tidak bisa dilepaskan dari pusran politik praktis. Terbentuknya varian-varian politik elit Persatuan Tarbiyah Islamiyah ini tidak terlepas dari aspek kesejarahan organisasi ini, dimana organisasi ini diawal perkembangannya telah menjadi partai politik dengan nama Partai Politik Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), yang pada tahun 1955 mengikuti Pemilu. Namun eksistensi organisasi ini dalam bidang politik hanya bertahan sampai tahun 1970-an selepas kemelut panjang yang menimpa Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Sehingga organisasi ini mendeklarasikan diri untuk melapaskan baju politiknya dan kembali *khittah* perjuangan yaitu di bidang pendidikan, sosial dan dakwah.

Organisasi Tarbiyah Islamiyah mengambil sebuah keputusan yang penting yaitu untuk tidak berafiliasi lagi dengan partai politik apapun. Dalam hal ini Tarbiyah Islamiyah di deklarasikan sebagai organisasi masa keagamaan yang independen.<sup>6</sup> Walaupun Tarbiyah menyatakan independen dan tidak lagi terlibat dalam politik praktis, tetapi kondisi ini tidak ditunjukkan oleh elit-elit Tarbiyah yang masih terlibat

---

<sup>6</sup>Alaidin Koto, *Sejarah Perjuangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Pentas Nasional*, (Jakarta: Tarbiyah Press, 2006) 128-135.



dalam partai politik. Elit -elit Tarbiyah Islamiyah pada pasca Orde Baru masih mendapat fasilitas untuk dicalonkan menjadi anggota legislatif di DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/ Kota. Mereka yang terlibat dalam partai politik secara tidak langsung telah menarik masa Tarbiyah untuk menyalurkan aspirasi politik mereka ke Partai Golkar. Di sisi lain elit -elit yang berada di luar partai politik (elit non partisan) seperti akademisi dan birokrat juga memiliki kepentingan untuk menjaga eksistensi organisasi ini agar jauh dari kepentingan-kepentingan politik.

Faksi-faksi ini semakin tampak ketika elit -elit non partisan melihat bahwa keterlibatan sekecil tokoh Tarbiyah Islamiyah dalam dunia politik tidak membawa dampak apa-apa terhadap perkembangan Tarbiyah. Misi organisasi yang konsisten dengan tiga tugas pokoknya. *Pertama*, di bidang pendidikan, memberikan kontribusi bagi kepentingan duniawi dan ukhrawi umat, khususnya menyediakan generasi yang mampu bersaing dalam kualitas baik di tingkat nasional maupun internasional. *Kedua*, di bidang dakwah, memberikan dakwah yang menyejukkan dan santun, lebih menonjolkan persamaan untuk mengarifkan perbedaan. *Ketiga*, di bidang kesejahteraan, mengupayakan perluasan wawasan, menjadi sangat terabaikan.

Paradigma warga Tarbiyah Islamiyah Desa Batu Belah dalam memilih pemimpin dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Kampar tahun 2011 secara organisatoris warga Tarbiyah Islamiyah Desa Batu Belah dihibau oleh para tokoh Tarbiyah Islamiyah untuk memilih salah seorang pasangan calon yaitu pasangan calon nomor urut 2 (Drs. H.Burhanuddin Husin, MM- Ir. H. Zulher, MS) karena Ir. H. Zulher, MS merupakan salah seorang pengurus Tarbiyah Islamiyah Kabupaten Kampar.

Beberapa tokoh Tarbiyah Islamiyah Desa Batu Belah, menjadikan warga Tarbiyah Islamiyah sebagai salah satu basis kekuatan suara. Hal ini dilandasi oleh beberapa pemikiran anatara lain: *Pertama*, karena mereka ingin menjadikan pemimpin daerah berasal dari organisasi Tarbiyah Islamiyah yang diharapkan mampu membawa perubahan dan kemajuan organisasi; *Kedua*, Dengan memilih tokoh Tarbiyah Islamiyah diharapkan mampu mengembangkan potensi dan naluri politik yang mereka miliki, sehingga memperoleh akses kepada kekuasaan, dan mampu mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah.

Berdasarkan temuan penelitian, mengindikasikan bahwa beberapa tokoh masyarakat Tarbiyah Islamiyah Desa Batu Belah, diantaranya tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh intelektual memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pilkada yang berlangsung di Kabupaten Kampar. Adapun tokoh agama, meskipun ada juga yang beralasan tidak memasukkan peranannya dikarenakan beliau tidak aktif dalam arti tidak memihak secara langsung dalam kapasitasnya sebagai tokoh agama. Tetapi secara personal beliau mengatakan bahwa hak-hak politiknya sebagai warga Tarbiyah Islamiyah Desa Batu Belah itu ada, sehingga beliau menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada yang berlangsung di Kabupaten Kampar.

### **3. Analisis Perbedaan Paradigma Kedua Organisasi**

Secara teoritis format demokrasi pada arus lokal (Pilkada) meniscayakan adanya kadar dan derajat kualitas partisipasi masyarakat yang baik. Apabila demokrasi yang totalitas bermetamorfosis menjadi kongkrit dan nyata, atau semakin besar dan baik kualitas partisipasi masyarakat, maka kelangsungan demokrasi akan

semakin baik pula. Demikian juga sebaliknya, semakin kecil dan rendahnya kualitas partisipasi masyarakat maka semakin rendah kadar dan kualitas demokrasi tersebut.

Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan mengenai studi perilaku politik keagamaan warga Muhammadiyah dan Tarbiyah Islamiyah Desa Batu Belah dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kampar Tahun 2011. Tokoh keagamaan pada umumnya merupakan suatu kolektifitas dari individu-individu yang tinggal dan menetap pada suatu wilayah yang sama dan saling berinteraksi satu sama lain, sehingga kumpulan individu-individu ini mempunyai karakteristik tersendiri yang dapat dibedakan dengan masyarakat lain.

Maka dari itu sesuai yang dikemukakan oleh Ng. Philipus dan Nurul Aini, bahwa ilmu sosial mencoba memahami, menelaah, meneliti, mencari persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Ia mencoba memahami tingkah laku individu dalam masyarakat, dan tingkah laku masyarakat dengan masyarakat yang lain. Ia mencoba memahami tingkah laku individu dalam masyarakat, dan tingkah laku masyarakat sebagai kumpulan individu dengan kelompok masyarakat yang lain. Ia mencoba memahami, meneliti, menemukan perbedaan dan persamaan interaksi individu dalam masyarakat dan interaksi masyarakat dengan kelompok masyarakat lain. Ia juga mencoba memahami pikiran, ide, gagasan, lembaga-lembaga yang mewujudkan ide, gagasan dan pikiran, struktur sosial yang muncul akibat dari perbedaan pemilikan atas barang-barang yang dianggap bernilai, persaingan dan konflik yang timbul akibat dari usaha memperebutkan nilai-nilai yang dianggap bernilai, perubahan-perubahan sosial, baik

dalam artian pikiran, gagasan, struktur sosial maupun dalam artian lembaga sosial secara keseluruhan.<sup>7</sup>

Eksistensi tokoh masyarakat sebagai perwujudan dari masyarakat itu sendiri sebagaimana halnya penelitian yang telah dilakukan di Desa Batu Belah Kabupaten Kampar bahwa identifikasi partisipasi politik warga Muhammadiyah dan Tarbiyah Islamiyah Desa Batu Belah dengan latar belakang ideologis bahkan politis, tidak menjamin adanya suatu kekuatan yang menggerakkan masyarakat apalagi mempengaruhi perilaku memilih masyarakat. Terkadang eksistensi tokoh keagamaan yang menentukan kemana pilihan masyarakat dijatuhkan.

Hubungan antara tokoh organisasi keagamaan dengan masyarakat itu sendiri, yakni hubungan antara tokoh masyarakat yang memiliki sumber kekuasaan dan kekuasaan aktual dengan masyarakat yang dikuasai. Ini juga sangat relevan dari apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip Ng. Philipus, dan Nurul Aini yang memberikan diferensiasi antara kekuasaan dengan kewenangan (*authority* atau *legalized power*) ialah bahwa kemampuan untuk memengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan. Sementara itu, wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau kelompok orang, yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Legitimasi yang diberikan oleh masyarakat kepada figur idolanya, biasanya menjadi barometer kekuasaan sang elit.<sup>8</sup>

Dalam hal ini, kekuasaan yang dimiliki oleh tokoh organisasi keagamaan tersebut, tidak serta merta termanifestasi kedalam suatu bentuk wewenang yang *legitimate* secara konstitusional. Melainkan hanya berkisar pada sesuatu pengaruh

---

<sup>7</sup>Ng. Philipus, dan Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006), hlm. 169.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 172.

yang bersifat otokratis-tradisional, bukan secara eksplisit termaktub dalam aturan-aturan konstitusional. Legitimasi terhadap figur tokoh masyarakat tentunya tidak bisa lepas dari suatu pemahaman bahwa dominasi etnisitas yang dewasa ini muncul sebagai kekuatan politik mampu mendongkrak suatu bangunan politik didaerahnya. Suatu kekuatan yang bersifat sakralistik yang mengiringi arus demokratisasi di tingkat lokal.

Perilaku memilih tokoh masyarakat cenderung diarahkan oleh kuatnya ikatan subjektif-psikologis yang syarat dengan primordialisme radikal. Dengan kata lain, bahwa kuatnya ikatan yang membentuk perilaku masyarakat yang dapat melegitimasi suatu rezim atau sistem politik tersebut dikemukakan dengan baik oleh Gabriel A. Almond sebagaimana dikutip Mohtar Mas'oeed dan Colin MacAndrews, mengatakan bahwa, berbagai mitos, doktrin, dan filsafat politik menanamkan suatu penafsiran tertentu mengenai tujuan-tujuan dan norma-norma kepada setiap generasi.<sup>9</sup>

Unsur-unsur yang sangat menentukan dalam proses penanaman atau pewarisan nilai-nilai itu adalah orang tua, saudara, teman sepergaulan, guru, organisasi dan pemimpin masyarakat, disamping juga lambang-lambang fisik seperti bendera dan upacara-upacara yang dipenuhi dengan makna politik. Proses menanamkan rasa-terikat (*attachment*) pada diri anggota masyarakat ini kemudian menjadi berakar sangat kuat, sehingga kadar legitimasi pada sistem politik tersebut menjadi sangat tinggi pula. Secara empiris terbukti bahwa dalam sistem politik yang

---

<sup>9</sup>Mohtar Mas'oeed dan Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1999), hlm. 381.

dapat bertahan hidup paling lama, pasti terdapat dukungan yang ditumbuhkan dan dipelihara oleh keyakinan yang mendalam.<sup>10</sup>

## **B. Perilaku Politik Keagamaan Warga Muhammadiyah dan Tarbiyah Islamiyah**

### **Desa Batu Belah dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kampar 2011**

Berdasarkan paradigma warga Muhammadiyah dan Tarbiyah Islamiyah Desa Batu Belah di atas, maka dalam penelitian ini akan membahas perilaku politik keagamaan kedua organisasi tersebut yang cenderung tidak sama. Berikut uraian wawancara terhadap beberapa informan warga Muhammadiyah dan Tarbiyah Islamiyah Desa Batu Belah baik itu tokoh adat, agama, pemuda dan tokoh intelektual.

Persoalan ini menjadi hal penting, manakala dalam meneliti dan mengamati perilaku politik kedua organisasi pada Pilkada 2011 di Kabupaten Kampar, hal ini merupakan salah satu bukti peranan politik keagamaan mempengaruhi perilaku pemilih. Untuk lebih jelasnya penulis bahas secara terpisah dengan pembahasan sebagai berikut:

#### **1. Perilaku Politik Keagamaan Muhammadiyah**

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dari Muhammadiyah Desa Batu Belah baik itu, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh intelektual, mereka sangat antusias dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang penulis berikan. Namun menganggap bahwa masih banyak terdapat ketertutupan informan dalam menjawab pertanyaan dari penulis mengenai keterlibatannya pada Pilkada 2011 di Kabupaten Kampar, dalam hal ini adalah tokoh

---

<sup>10</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 1998) hlm. 10.

agama organisasi Muhammadiyah Desa Batu Belah yakni Bapak Nasri Alamsa, SH, MH, saat penulis bertanya mengenai keterlibatan beliau pada pilkada 2011, beliau menjawab:

*“Saya tidak terlibat secara langsung misalnya dalam mendukung salah satu calon, dalam kapasitas saya sebagai tokoh agama saya tidak menggunakan itu, tapi secara personal saya sebagai warga negara yang mempunyai hak pilih, maka saya menggunakan hak pilih tersebut. Saya sangat mendukung putra asli daerah yang jadi pemimpin, selain itu pemimpin yang paling tepat bagi harus yang punya kemampuan, akhlak yang baik, integritas, dan punya visi-misi yang jelas”.*<sup>11</sup>

Selain tokoh agama yang cukup dekat masyarakat, Nasri Alamsa, SH, MH, juga merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pengadilan Agama Bangkinang Kabupaten Kampar, jadi akses informasi mengenai pilkada tentunya menjadi sesuatu yang memungkinkan masyarakat untuk menjadikannya sebagai sumber pilihan masyarakat dalam memilih pemimpin. Jika kita menyimak argumen yang dikeluarkan responden tersebut, bahwa pilihan Nasri Alamsa, SH pada prinsipnya cukup rasional namun masih terkesan terikat dengan ikatan-ikatan primordialisme kedaerahan.

Diselenggarakannya pilkada diberbagai daerah, inilah yang memicu lahirnya politik identitas melalui retradisionalisasi budaya. Munculnya kebijakan desentralisasi, memicu pula lahirnya budaya politik identitas. Di Desa Batu Belah Kabupaten Kampar sendiri, isu-isu identitas organisasi menjadi isu yang mencuat kepermukaan pada saat pilkada 2011. Meskipun demikian, warga Muhammadiyah tidak begitu memperlihatkan identitas organisasi dalam perilaku politiknya. Hal ini terlihat dari wawancara tokoh adat Muhammadiyah Datuok Indo Pado yang

---

<sup>11</sup> Wawancara penulis dengan Nasri Alamsa, SH, MH, salah seorang pengurus Muhammadiyah Desa Batu Belah, pada tanggal 26 April 2012 di rumahnya Dusun I Desa batu Belah Kecamatan Kampar, pukul 14.30 Wib.

sebenarnya dianggap sebagai *patron* tapi tidak begitu mengangkat identitas organisasi sebagai sebuah kekuatan politik untuk merebut kekuasaan. Berikut hasil wawancara dengan beliau:

*“Saya tidak melibatkan diri pada waktu Pilkada Kabupaten Kampar tahun 2011, namun saya berharap Pilkada ini berjalan dengan baik. Bahkan saya dengan berbagai elemen masyarakat yang lain menghimbau agar pesta demokrasi berjalan dengan damai guna menjaga ketenteraman dan ketertiban. Harus saya akui bahwa pengaruh adat masih sangat kental disini. Kalo saya sendiri memilih pemimpin, sudah tentu orang yang saya kenal baik. yang bisa menjaga tradisi, adat, dan dekat dengan masyarakat secara emosional. persoalan adat menjadi cita-cita luhur yang harus dijaga oleh masyarakat Desa Batu Belah Kecamatan Kampar.”*<sup>12</sup>

Pendapat serupa pun diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat dari organisasi Muhammadiyah Ir. H. Zulfahmi, hal ini terlihat dari hasil wawancaranya menegaskan bahwa:

*” Saya tidak mau terlibat secara langsung, sebagai tokoh masyarakat dari warga Muhammadiyah Desa Batu Belah saya tidak terang-terangan mendukung salah satu calon, karena yang terpenting adalah pemimpin Kabupaten Kampar ini adalah memenuhi unsur kriteria seorang pemimpin yang baik, dan mampu memajukan Kabupaten Kampar menjadi sebuah daerah kabupaten yang maju di Provinsi Riau”.*<sup>13</sup>

Sama halnya dengan para informan di atas, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tokoh pemuda organisasi Muhammadiyah, Alfian, S.Ag, M.Si ketika ditanya mengenai keterlibatan beliau pada Pilkada Kabupaten Kampar tahun 2011 dengan tegas beliau mengatakan :

*“ Saya pernah diajak bergabung oleh tim sukses salah satu pasangan calon yang diusung oleh partai tertentu, tapi saya dengan halus menolaknya. Bagi*

---

<sup>12</sup> Wawancara penulis Datuk Indo Pado dengan salah seorang tokoh adat dari organisasi Muhammadiyah Desa Batu Belah, pada tanggal 30 April 2012 di rumahnya Dusun V Desa Batu Belah Kecamatan Kampar, pukul 13.30 Wib.

<sup>13</sup> Wawancara penulis dengan Ir. H. Zulfahmi, salah seorang tokoh masyarakat dari organisasi Muhammadiyah Desa Batu Belah, pada tanggal 30 April 2012 di rumahnya Dusun V Desa Batu Belah Kecamatan Kampar, pukul 15.30 Wib.



*saya pemimpin itu harus mempunyai visi-misi dan hal itu harus terpenuhi demi kesejahteraan masyarakat. Harus responsif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat, membangun prasarana seperti perbaikan jalan sehingga transportasi darat menjadi lancar, mengelola dengan baik sektor pertanian, pertanahan, dan peternakan. Kalo saya pribadi, memilih pemimpin itu sederhana saja, dia harus cerdas, berpikir sehat dan mampu melakukan pendekatan yang baik terhadap masyarakat”.*

## **2. Perilaku Politik Keagamaan Tarbiyah Islamiyah**

Berbeda halnya dengan perilaku politik keagamaan warga Muhammadiyah, nampaknya perilaku politik warga Tarbiyah Islamiyah cenderung lebih menunjukkan dukungannya kepada salah satu pasangan calon. Berdasarkan wawancara dengan para informan dari tokoh agama yang mewakili organisasi Tarbiyah Islamiyah Desa Batu Belah berpendapat bahwa pada prinsipnya pemimpin itu mesti dekat dengan masyarakat, dan memiliki kecerdasan serta akhlak yang baik untuk dijadikan panutan bagi masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh Ir. H. Ahmad Suhaili, SH, MH saat ditemui di rumahnya:

*“Saya memang tidak terlibat secara langsung dengan kapasitas saya sebagai seorang Pengurus Tarbiyah Islamiyah Desa Batu Belah, tapi secara personal iya saya terlibat dan mendukung salah satu calon. Saya sangat simpati H. Zulher sebagai calon wakil bupati dari Bupati incumbent H. Burhanuddin Husin, karena selain cerdas, juga cukup perhatian kepada masyarakat.”<sup>14</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa pengurus organisasi Tarbiyah Islamiyah cenderung memberikan legitimasi kepada salah satu calon, walaupun tidak secara langsung mendukung tetapi ini menunjukkan dan menganggap bahwa apa yang dibahasakan oleh pengurus Tarbiyah Islamiyah tersebut terang-terangan mendukung salah satu calon.

---

<sup>14</sup> Wawancara penulis dengan Ir. Ahmad Suhaili, SH, MH, salah seorang pengurus Tarbiyah Islamiyah Desa Batu Belah, pada tanggal 29 April 2012 di rumahnya Jl. Agus Salim No. 65 Bangkinang, pukul 15.45 Wib.

Tidak jauh berbeda halnya dengan pendapat pengurus Tarbiyah Islamiyah Ir. H. Ahmad Suhaili, SH, MH di atas, bahwa salah seorang tokoh Tarbiyah Islamiyah dari unsur tokoh adat Datuk H. Miran dengan tegas memperlihatkan secara langsung dukungannya bahkan beliau termasuk salah seorang tim pemenangan salah satu kandidat, Berikut petikan wawancara singkat dengan beliau :

*“Saya terlibat pada Pilkada Kabupaten Kampar 2011 sebagai Tim Sukses Pemenangan H. Jefry Noer – Ibrahim Ali, tetapi Menang dan kalah itu biasa dalam percaturan politik, sosok pemimpin itu tidak harus mempunyai pendidikan akademis yang tinggi. Bagi saya, seorang pemimpin itu harus memiliki semangat juang yang tinggi untuk memajukan daerah, dekat secara emosional dengan masyarakat, selalu mendukung dan mendorong aktifitas keagamaan, dan memiliki pula kearifan lokal sebagai putra daerah”.*<sup>15</sup>

Pendapat serupa disampaikan salah satu tokoh pemuda Tarbiyah Islamiyah Desa Batu Belah, berikut ini kutipan wawancaranya:

*“Keterlibatan saya pada saat Pilkada Kampar pada tahun 2011 dan saya mendukung salah satu calon, bahwa saya sebagai salah satu tokoh pemuda terlibat langsung dalam pesta politik tersebut. Sebagai pemimpin pemuda di Desa Batu Belah saya turut serta dalam mengkampanyekan salah satu pasangan calon. Karena bagi saya pemimpin harus mempunyai integritas yang tinggi dalam mempengaruhi masyarakat, terutama dalam kegiatan kepemudaan dan pemimpin bukan hanya cerdas tapi mampu memahami apa yang diinginkan masyarakatnya”*<sup>16</sup>

Wawancara singkat dengan tokoh pemuda Tarbiyah Islamiyah Desa Batu Belah diatas, semakin memperkuat asumsi bahwa organisasi Tarbiyah Islamiyah cenderung mengarahkan pandangan politik masyarakat pada salah satu calon. Sebagai otoritas berpengaruh, para tokoh masyarakat, baik dari unsur organisasi, tokoh agama, dan pemuda sebagai *patron* yang mempunyai sumber kekuasaan dalam

---

<sup>15</sup> Wawancara penulis dengan Datuk H. Miran, salah seorang tokoh adat dari organisasi Tarbiyah Islamiyah Desa Batu Belah, pada tanggal 28 April 2012 di rumahnya Dusun III Desa batu Belah Kecamatan Kampar, pukul 29.00 Wib.

<sup>16</sup> Wawancara penulis dengan Mulyadi Ahmad, salah seorang tokoh pemuda dari organisasi Tarbiyah Islamiyah Desa Batu Belah, pada tanggal 29 April 2012 di rumahnya Dusun III Desa batu Belah Kecamatan Kampar, pukul 11.00 Wib.

mengarahkan opini publik, tetapi hal ini berbeda dari apa yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo yang mengatakan bahwa bangkitnya kebudayaan modern. Kebudayaan sejak lahirnya, merebut tempat kebudayaan tradisional termasuk sikap politik keagamaan sebagai budaya yang sah bagi generasi mendatang. Beliau menambahkan bahwa terjadi *erosi* pada kebudayaan tradisional, menuju kebudayaan nasional.<sup>17</sup> Memang benar apa yang dikatakan oleh Kuntowijoyo, bahwa telah terjadi pergeseran budaya tradisional menuju budaya nasional.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan tokoh keagamaan organisasi Tarbiyah Islamiyah yang dijadikan sebagai informan maka menemukan sebuah fakta konkrit bahwa ikatan-ikatan identitas organisasi menjadi faktor yang berpengaruh dalam perilaku politik dan perilaku memilih warga Tarbiyah Islamiyah Desa Batu Belah. Kuatnya ikatan identitas organisasi menjadi hal yang fundamental pada pilkada 2011 di kabupaten Kampar. Identitas organisasi keagamaan semakin menguat dan memperoleh tempatnya dalam dinamika politik lokal di Desa Batu Belah Kabupaten Kampar.

### **3. Analisis Perilaku Politik Keagamaan Kedua Organisasi**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, sebagaimana dikutip dari Agus Salim bahwa dalam perkembangannya di Indonesia identitas organisasi telah mengalami proses pemanipulasian oleh elit dan dijadikan instrumen perjuangan politik dan budaya untuk memperebutkan kekuasaan. Di tingkat lokal terutama pada masyarakat dimana sistem primordial identitas masih kuat berpengaruh, identitas etnis dan organisasi masih menjadi daya tawar yang menarik. Mengedepankan

---

<sup>17</sup>Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Tiara Wacana. 2006), hlm. 78.

perilaku politik keagamaan dengan mengedepankan unsur identitas organisasi keagamaan sebagai alat negosiasi politik, bagi elit ternyata masih dianggap sebagai sarana efektif untuk merealisasikan tujuan politiknya tetapi di sisi lain upaya itu ternyata bisa menimbulkan dampak negatif berupa lahir dan tumbuhnya benih-benih konflik horizontal antar masyarakat yang justru menjadi faktor penghambat pencapaian tujuan.<sup>18</sup>

Konflik tersebut senantiasa hadir sebagai sosial yang tidak bisa dilepaskan, ini tergambar dengan jelas oleh apa yang telah dikemukakan oleh Agus Salim, bahwa setiap kelompok organisasi atau komunitas menempati sebuah posisi dalam struktur sosial masyarakat, yang secara tradisional diterima dan diakui kelompok masing-masing organisasi. Konsep ini secara politik menjadikan hubungan antar identitas organisasi sosial dan keagamaan dan berkembang menjadi perbedaan yang tajam dan diskriminasi antara warga masyarakat. Dalam hal ini terjadi akibat perbedaan akses terhadap sumber-sumber daya sosial politik yang dikuasai. Berbagai bentuk diskriminasi muncul diantara mereka yang terpisah dalam kelompok-kelompok tertentu.<sup>19</sup>

Kecenderungan budaya mengedepankan organisasi (*organization group*) yang diterapkan oleh Muhammadiyah dan Tarbiyah Islamiyah Desa Batu Belah mengindikasikan bahwa demokratisasi di tingkat lokal yang diharapkan mampu memberikan dampak yang positif di daerah, itu kemudian jauh dari apa yang menjadi cita-cita demokrasi itu sendiri karena cenderung mengakibatkan terjadinya pecah belah dalam masyarakat yang dikhawatirkan membawa kepada perspektif sempit dari

---

<sup>18</sup>Agus Salim, *Stratifikasi Etnik*, (Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 2006), hlm. 281.

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 282.

makna politik yang lebih luas. Hadirnya Pilkada sebagai tuntutan di ranah lokal yang merupakan manifesto kebijakan desentralisasi yang diselenggarakan oleh mulai hampir sebagian besar daerah di Indonesia.

Adanya suatu kecenderungan perilaku yang bersifat umum (*general will*), dan terkontruksi secara sistematis dan mengakar dan merupakan hal yang wajar, karena menurut Gene Sharp dan David Easton sebagaimana dikutip Mohtar Mas' oed dan Colin MacAndrews bahwa alasan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya suatu tradisi yang mengikat, kesetiaan pada kelompok, dan kesadaran hukum.<sup>20</sup> Maka eksistensi tokoh organisasi sosial-keagamaan masyarakat yang representatif mewakili keberadaan masyarakat itu sendiri, merupakan hal yang mendorong munculnya semangat pecah belah (pengelompokan) dalam sistem masyarakat Desa Batu Belah.

---

<sup>20</sup>Mohtar Mas' oed dan Colin MacAndrews , *Op. Cit*, hlm. 383.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Paradigma warga Muhammadiyah Desa Batu Belah dalam memilih pemimpin berpandangan bahwa sebagai organisasi non-politik, tidak begitu terlibat dalam politik praktis dengan mendukung terhadap salah satu pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Kabupaten Kampar tahun 2011. Hal ini dapat dilihat dari dua sikap; *Pertama*, Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang bergerak dalam hal amaliyah dan mu'amalah sehingga tidak mempunyai hubungan organisatoris dan bukan merupakan afiliasi dari suatu partai politik; *Kedua*, setiap warga Muhammadiyah, sesuai dengan hak asasinya, bebas untuk menyalurkan aspirasi melalui organisasi lain atau partai politik di mana secara individu dapat memainkan peran politiknya sesuai dengan aspirasi politiknya, dan secara kelembagaan, Muhammadiyah memberi kebebasan kepada warganya. Sedangkan paradigma Tarbiyah Islamiyah menjadikan warga Tarbiyah Islamiyah sebagai salah satu basis kekuatan suara. Hal ini dilandasi oleh dua pemikiran: *Pertama*, karena mereka ingin menjadikan pemimpin daerah berasal dari organisasi Tarbiyah Islamiyah yang diharapkan mampu membawa perubahan dan kemajuan organisasi. *Kedua*, dengan memilih tokoh Tarbiyah Islamiyah diharapkan mampu mengembangkan potensi dan naluri politik yang mereka miliki, sehingga memperoleh akses kepada kekuasaan, dan mampu mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah.

2. Perilaku politik keagamaan warga Muhammadiyah dan Tarbiyah Islamiyah Desa Batu Belah dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Kampar 2011 terdapat perbedaan yang cukup signifikan, warga Muhammadiyah tidak mau terlibat langsung dalam proses dan memberikan dukungan kepada pasangan calon, sedangkan warga Tarbiyah Islamiyah, terlibat langsung dalam proses politik yang sedang berlangsung dengan menghimbau warganya untuk memilih salah satu pasangan calon dan bahkan ada diantara tokohnya terjun langsung menjadi salah satu tim sukses pemenangan salah satu calon.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya paradigma organisasi keagamaan dalam memilih pemimpin dibutuhkan kolektivitas sebagai salah satu wujud terciptanya suatu kearifan sosial masyarakat yang demokratis.
2. Tokoh organisasi keagamaan masyarakat sebagai mainstream perilaku politik harusnya bersikap lebih netral, sehingga tercipta dan terbina harmoni kehidupan masyarakat yang lebih bersatu dalam ikatan kebersamaan yang mengedepankan prinsip *Al-Jama'atu rahmah wa al-furqatu 'azab* dan sesuai dengan cita-cita demokratisasi.
3. Fanatisme identitas organisasi keagamaan di tingkat desa dapat menjadi hambatan rekonsiliasi politik dalam percaturan Pilkada. Hal ini harusnya dapat dieliminir sehingga anggapan bahaya politik pecah belah antar organisasi keagamaan dapat dihindari.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Achmad Habib, 2004, *Konflik Antar Etnik di Pedesaan*, PT. LKiS, Yogyakarta.
- Adi Suprpto, 2005, *Pilkada Langsung dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, Fisip UVN Veteran, Yogyakarta.
- Agus Salim, 2006, *Stratifikasi Etnik*, Penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Ahmad Nadir. 2005, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, Averroes Press, Malang.
- Alaidin Koto, 2006, *Sejarah Perjuangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Pentas Nasional*, Tarbiyah Press, Jakarta.
- Ambo Upe, 2008, *Sosiologi Politik Kontemporer*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Arifin Rahman, 1998, *Sistem Politik Indonesia; Dalam Perspektif Struktural Fungsional*, SIC, Surabaya.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar, 2010, *Kampar Dalam Angka –(Kampar in Figures)*, BPS Kab. Kampar, Bangkinang Riau.
- Bagong Suyatno, dan Sutinah (ed), 2005, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Burhan Bungin, 2002, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Donald Parulian, 1997, *Menggugat Pemilu*, PT. Penebar Swadaya, Jakarta..
- Doni Hendrik, 2003, *Perilaku Memilih Etnis Cina dalam Pemilu tahun 1999 di Kota Padang*, Jurnal Politika Vol. 1, Padang.
- Faisal Sanafiah, 1990, *Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar Aplikasi*, YA3, Malang.
- Herbert Mc.Closky, 2010, *International Encyclopaedia of the Social Sciences*, dalam Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- John W. Craswell, tt, *Research Design, Qualitative and Quantitative Approaches*, Kik Press. Jakarta.



- Joko J. Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kuntowijoyo, 2006, *Budaya dan Masyarakat*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Manasse Malo. 1985, *Metode Penelitian Sosial Modul 1-5*. Kuranika, Jakarta.
- Mardalis, 2006, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Masri Singarimbun, dan Sofyan Efendi (ed), 1989, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- Maswadi Rauf, 2001, *Konsensus & Konflik Politik*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Miriam Budhiardjo, 1998, *Partisipasi dan Partai Politik*, PT.Gramedia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Dasar-Dasar ilmu politik*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Mochtar Mas'ood, Nasikun, 1987, *Sosiologi Politik*, PAU Studi Sosial UGM, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 1999, dan Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Moeloeng, J, Lexy, 1997, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Nasikun, 2006, *Sistem Sosial Indonesia*, PT. RajaGrafindo, Jakarta.
- Ni'matul Huda, Tt, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perjuangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ng. Philipus, dan Nurul Aini, 2006, *Sosiologi dan Politik*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ramlam Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia, Widiasarana Indonesia, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2007. *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Oleh Rakyat Merupakan bagian Dari Pemilihan Umum*, dalam <http://www.kpu.go.id/wacana>.

S. Nasution, 1996, *Metode Penelitian Naturalistik*, Tarsito, Bandung.

Sudijono, Sastroatmodjo, 2005, *Perilaku Politik*, IKIP Press, Semarang.

Soerjono soekanto, 2007, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Surbakti, 1992, *Memahami ilmu politik*, PT. Grasindo, Jakarta.

Suwarno, 2001, *Muhammadiyah Sebagai Oposisi*, UII Press, Yogyakarta,

Syamsul H. Tubani, 2005, *Pilkada Bima 2005; Era Baru Demokratisasi Lokal di Indonesia*, Jawa Timur, Bina Swagiri-Fitra Tuban.

### **Peraturan Perundang-undangan dan Internet**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kacung Marijan. Blog at wordpress.com. Diakses pada tanggal 25 April 2012 pukul 14.30.

Pratikno, Blog at Wordpress.com. Diakses pada tanggal 27 April 2012 pukul 13.50.

Wikipedia.org/wiki/Masyarakat. Diakses dari [www.google.co.id](http://www.google.co.id), pada tanggal tanggal 28 April 2012 pukul 9.15.

[www. Wikipedia.Com](http://www.Wikipedia.Com).